

**PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
DI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Megister Manajemen Pendidikan Islam



OLEH :

TAUPIK

NIM. 0905 S2 995

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2011

ABSTRAK

Taupik, 2011, Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pelaksanaan wajib belajar pada hakekatnya merupakan upaya sistematis Pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan Nasional, serta adaktif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang muaranya adalah pendekatan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Program wajib belajar 9 tahun di Indonesia telah ditulis sejak tahun 1950, dalam Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahun terkena pendidikan wajib belajar. Namun program pendidikan wajib belajar yang dicanangkan oleg pemerintah baru dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya pergolakan politik. Fungsi wajib belajar sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 2008 tentang wajib belajar Bab II Pasal 2 ayat 1 berbunyi : “Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara Indonesia”. Sedangkan tujuan wajib belajar sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun pada Bab II Pasal 2 ayat 2 berbunyi : “Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup madani di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi”.

Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemerintah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yang mengacu pada perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10

II. LANDASAN TEORITIS

A. Kewajiban Belajar Bagi Manusia	11
1. Makna Belajar	11
2. Teori Belajar	20
3. Belajar Menurut Pandangan Islam	39
4. Kewajiban Belajar dalam Islam	40
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar	41

5.1 Faktor Internal Siswa	42
5.2 Faktor Eksternal Siswa	51
5.3 Faktor Pendekatan Belajar	54
6. Kebijakan Pendidikan di Indonesia	55
B. Wajib Belajar 9 Tahun	64
1. Pengertian Wajib Belajar 9 Tahun	64
2. Sejarah Wajib Belajar 9 Tahun	65
3. Fungsi dan Tujuan Wajib Belajar 9 Tahun	66
4. Pendekatan Wajib Belajar 9 Tahun	69
5. Peranan Orang Tua Terhadap Wajib Belajar	71
6. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan	77
6.1 Alasan-alasan perlunya Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan	78
6.2 Batasan Partisipasi Masyarakat	79
6.3 upaya-upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pendidikan	81
C. Telaah Kajian Terdahulu	84
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	89
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	90
1. Lokasi Penelitian	90
2. Waktu Penelitian	90
C. Subjek dan Objek Penelitian	91

1. Subjek Penelitian	91
2. Objek Penelitian	91
D. Populasi dan Sampel	91
1. Populasi	91
2. Sampel	92
E. Sumber Data	94
1. Data Primer	94
2. Data Sekunder	94
F. Metode / Teknik Pengumpulan Data	95
1. Angket	95
2. Observasi	96
3. Wawancara	97
4. Dokumentasi / Data Sekunder	98
G. Teknik Analisis Data	98
H. Konsep Operasional	99
IV. HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum	101
1. Sejarah Singkat Kecamatan Keritang	101
2. Geografis	104
3. Demografis	104
3.1 Penduduk	104
3.2 Mata Pencaharian	106
4. Agama, Pendidikan dan Adat Istiadat	107

4.1 Agama	107
4.2 Pendidikan	109
4.3 Adat Istiadat	110
B. Temuan Khusus	110
1. Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	110
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisiapsi Murni (APM)	113
2.1 Peningkatan Mutu Pendidikan	117
2.2 Kompetensi Guru	119
2.3 Kesejahteraan Guru	121
2.4 Sarana dan Prasarana Penunjang Proses Belajar Mengajar	123
2.5 Pengembangan Kurikulum	126
2.6 Akreditasi	128
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	135
3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Belajar Anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	135
3.2 Faktor-faktor Penyebab Kurang Terlaksananya Peningkatan Mutu Wajib Belajar 9 Tahun di	

	Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	139
	C. Analisa	144
V.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	160
	B. Saran	163
	DAFTAR PUSTAKA	165
	ANGKET PENELITIAN	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Wajib Belajar pada hakekatnya merupakan upaya sistematis Pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang muaranya adalah pendekatan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, program wajib belajar juga merupakan salah satu pengembangan skenario pendidikan yang dijangkaukan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara. Kewajiban tersebut merupakan salah satu pengejawatan isi Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang mengatakan bahwa, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini sejai dengan hasil Konferensi Pendidikan untuk Semua (Education for All) di Jomtien, Thailand, Maret 1990. Konferensi yang dihadiri oleh 1500 peserta dari 155 negara tersebut menegaskan bahwa “Pendidikan merupakan hak bagi semua orang dan juga dapat membantu secara meyakinkan orang menjadi lebih aman, lebih sehat, lebih berhasil, dan lebih berwawasan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan pendidikan untuk semua tersebut, deklarasi pendidikan untuk semua di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan Pendidikan Dasar, adalah pendidikan semesta (universal education). Artinya, sistem pendidikan nasional di Indonesia dikerangkakan untuk membuka dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga Negara untuk memperoleh pendidikan dasar.

Sejalan dengan isi deklarasi tersebut, awalnya program wajib belajar di Indonesia dimaknai sebagai pemberian kesempatan belajar seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan sampai dengan tingkat pendidikan tertentu.

Ditinjau dari dimensi Pembangunan Nasional secara keseluruhan, program wajib belajar merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun secara makro, peningkatan sumber daya manusia tersebut juga mencakup aspek dan ekonomi, namun dimensi utama dan kuncinya adalah pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia tersebut, sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, program wajib belajar mendesak untuk

dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu aset dan potensi utama pembangunan nasional.

Menyadari betapa besar dan pentingnya peran pendidikan dalam peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan pencanangan dan pemberlakuan program wajib belajar bagi setiap warga negara. Pada tahap awal pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 6 tahun yang pada dasarnya merupakan prasyarat umum bahwa setiap anak usia Sekolah Dasar (7-12 tahun) harus dapat membaca, menulis dan berhitung.

Program wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan pemerintah pada PELITA III tersebut telah memberikan dampak positif dan hasil yang menggembirakan, terutama pada percepatan pemenuhan kualitas dasar manusia Indonesia. Salah satu hasil yang paling mencolok dirasakan, bahwa program wajib belajar 6 tahun tersebut telah mampu menghantarkan angka partisipasi (murni) sekolah dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain : (1) Penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar, (2) Penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan (3) Pendidikan untuk semua.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemikiran kompetensi Pendidikan Dasar,

sebagai kompetensi minimal. Kompetensi pendidikan dasar yang dimaksudkan mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan dasar yang lebih tinggi (pendidikan menengah). Hal ini juga relevan dengan unsur-unsur kompetensi pendidikan dasar yang harus dikuasai lulusan seperti yang diidentifikasi oleh The International Development Research Center, meliputi : (1) Kemampuan berkomunikasi; (2) Kemampuan dasar berhitung; (3) Pengetahuan dasar tentang negara, budaya dan sejarah; (4) Pengetahuan dan keterampilan dasar dalam bidang kesehatan, gizi, mengurus rumah tangga dan memperbaiki kondisi kerja; dan (5) Kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bersikap dan berpikir kritis, serta dapat memanfaatkan yang didasari konsep “Pendidikan Dasar untuk Semua (Universal Basic Education)”, juga sejalan dengan Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Anak.

Disamping itu, menurut May, wajib belajar 9 tahun juga bertujuan untuk merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak yang pada pikirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Untuk itu, target penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun bukan semata-mata untuk mencapai target angka partisipasi sesuai dengan target yang ditentukan namun perhatian yang sama ditujukan juga memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan pelaksanaan pendidikan yang efektif.

Lebih lanjut, Wajib Belajar merupakan fondasi bagi pengembangan jenjang pendidikan lebih lanjut dan kemajuan peradaban bangsa khususnya dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman dan kompetisi tingkat global. Pendidikan dasar juga mampu mewujudkan masyarakat yang cerdas dan ekonomi yang mapan sehingga Negara menjadi maju.

Disisi lain, pelaksanaan wajib belajar baik 6 tahun maupun 9 tahun secara umum bertujuan untuk :

1. Memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat,
2. Setiap warga negara dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki,
3. Setiap warga negara mampu berperan serta jalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
4. Memberikan jalan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Sejalan dengan kebijakan nasional, dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan mandiri berdasarkan IMTAQ dan IPTEK, pemerintah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dengan segala upaya, untuk

mencapai tujuan yang diharapkan dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini.

Kualitas potensi diri peserta didik dan tenaga kependidikan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ditingkatkan untuk mencapai perbaikan perilaku berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokrasi dan bertanggung jawab berdasarkan IMTAQ dan IPTEK. Seluruh lapisan masyarakat untuk dapat terlibat dan berpartisipasi dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan yang disediakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berupa pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang belajar, pembelian subsidi, bantuan-bantuan fasilitas dan dana pendidikan.

Melalui program wajib belajar 9 tahun ini pula partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan formulasi indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SLTP, dan SLTA.'

Tujuan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang ditangani langsung oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3 yaitu mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa

2. Berakhlak mulia
3. Sehat
4. Berilmu
5. Cakap
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Demokrasi
9. Bertanggung Jawab

Sejalan dengan kebijakan nasional, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Keritang melaksanakan Wajib Belajar 9 Tahun mengacu pada 3 kebijakan :

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan
2. Peningkatan mutu pendidikan
3. Pemantapan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun

Walau demikian dari pengamatan dan temuan penulis di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir masih ada anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/MI dan usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/MTs.

Dari gambaran diatas penulis memandang sangat perlu untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Identifikasi Masalah

Untuk menganalisa implementasi wajib belajar di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di Desa Nusantara Jaya penulis akan mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Masih ada anak usia belajar yang tidak bersekolah
- b. Peran orang tua yang ada di Kecamatan Keritang khususnya di Desa Nusantara Jaya dalam mengimplementasikan wajib belajar
- c. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan di Desa Nusantara Jaya
- d. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan wajib belajar di Desa Nusantara Jaya
- e. Maksud wajib belajar
- f. Unsur-unsur yang tersedia untuk pendidikan
- g. Bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan
- h. Bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan
- i. Bagaimana pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang

- j. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

C. Batasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dari pengamatan dan temuan penulis, penulis membatasi permasalahan pada pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Rumusan Masalah

Dalam menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang ?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini Penulis ingin mengetahui dan menjelaskan tentang :

1. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

2. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi dunia penelitian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dapat dijadikan referensi dalam bidang yang sama maupun bidang pendidikan yang lainnya.
2. Bagi pihak yang terkait seperti pemerintah, masyarakat, guru dan orang tua hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kemajuan dan perkembangan pendidikan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. KEWAJIBAN BELAJAR BAGI MANUSIA

1. Makna Belajar

Wahyu yang pertama diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW (surat Al-‘Alaq [96]:1-5) memberikan isyarat bahwa Islam amat memerhatikan soal belajar (dalam konteks menuntut ilmu), sehingga implementasinya menuntut ilmu (belajar) itu wajib menurut Islam. Di dalam Al-Qur’an banyak kita temukan kalimat seperti *ya’qilûn*, *yatafakkarûn*, *yubsirûn*, *yasma’ûn*, dan sebagainya. Kalimat-kalimat di atas mengisyaratkan bahwa Al-Qur’an (Islam) menganjurkan agar kita menggunakan potensi-potensi atau organ-organ psiko-psikis, seperti akal, indra penglihatan (mata) dan indra pendengaran (telinga) untuk melakukan kegiatan belajar. Sebagai alat belajar, akal merupakan potensi kejiwaan manusia berupa sistem psikis yang kompleks untuk menyerap, mengolah, menyimpan, dan memproduksi kembali item-item informasi dan pengetahuan (ranah kognitif). Selanjutnya, mata dan telinga merupakan alat fisik yang berguna untuk menerima informasi visual dan informasi verbal¹.

¹ Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan Kompetensi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h 54.

[illegible]

Af'idah dalam ayat di atas, menurut Quraisy Shihab (1992) berarti “daya nalar”, yaitu potensi atau kemampuan berpikir logis atau dengan perkataan lain “akal”. Berkenaan dengan potensi akal, Al-Qur'an surat Az-Zumar [39]:9 menegaskan bahwa:

[illegible]

Artinya : “apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui, Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang mampu menerima pelajaran.”

Dalam konteks belajar secara umum, Qardhawi (1989) mengutip hadis riwayat Ibnu ‘Ashim dan Thabrani menyatakan: “*Wahai sekalian manusia, belajarlah! Karena ilmu pengetahuan hanya didapat melalui belajar.*”

Seperti disebutkan di atas, dalam perpekstif Islam, belajar merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim-Muslimat dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan sehingga derajat kehidupannya meningkat. Firman Allah:

[illegible]

Artinya : “Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat kepada orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu” (QS. Al-Mujadilah [58]:11). Di sisi lain, Allah SWT melalui Rasul-Nya menganjurkan supaya menuntut ilmu dari buaian hingga ke liang lahat, menunjukkan bahwa Islam memandang penting belajar.

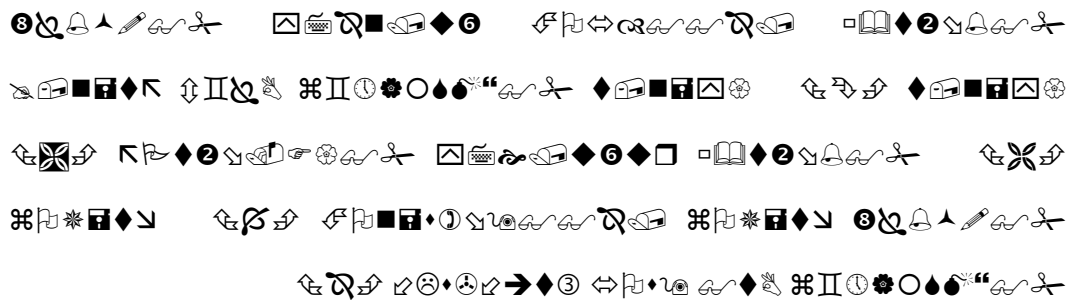
Dalam Islam, proses belajar pertama bisa kita lihat pada Nabi Adam di mana Allah mengajarkan berbagai nama benda kepadanya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda, tabiat dan sifat-sifatnya, dan Adam disuruh mengulangi pelajaran tersebut di hadapan para Malaikat. Peristiwa yang terjadi pada Nabi Adam ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]:33 yang menegaskan bahwa :



Artinya: *“Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini....”*

Selanjutnya peristiwa belajar juga bisa dilihat pada putra Nabi Adam ketika salah seorang putra Nabi Adam (Qabil) membunuh saudaranya (Habil) dan Qabil merasa khawatir tidak menemukan bagaimana cara menguburkan jenazah saudaranya, dalam kondisi kebingungan itu, tiba-tiba Qabil melihat burung gagak mencakar-cakar tanah untuk menguburkan bangkai burung gagak yang lainnya. Dengan meniru tingkah laku gagak, Habil dapat menguburkan jenazah saudaranya.

Wahyu yang pertama diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pun berkenan dengan perintah belajar (khususnya belajar membaca, *iqra'*) Allah SWT berfirman :



Nabi Muhammad SAW sangat mendorong supaya belajar dengan memberikan contoh-contoh praktis dan dengan lisan dan perbuatan. Beliau telah membebaskan para tahanan dari kaum kafir yang terpelajar, apabila mereka dapat

15

mengajar beberapa kaum Muslim untuk membaca dan menulis. Ini pertanda bahwa Rasul SAW berkeinginan keras supaya pendidikan merata di kalangan orang Islam. Beliau pun memberikan hak belajar membaca dan menulis bagi kaum wanita, dan beliau sendiri pernah meminta kepada shafah al-Adawiyah supaya memberikan pelajaran membaca dan menulis kepada istri beliau, Hafsa³.

Dalam perspektif Islam makna belajar bukan hanya sekadar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal, karena sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan belajar dalam Islam bukanlah mencari rezeki di dunia ini semata, tetapi untuk sampai kepada hakikat, memperkuat akhlak, artinya mencari atau mencapai ilmu yang sebenarnya dan akhlak yang sempurna.

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, termasuk pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah dan madrasah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan, banyak tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh anak didik.

Belajar merupakan *key term* (istilah kunci) yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya kependidikan, misalnya psikologi belajar. Sedemikian penting arti belajar, bagian terbesar riset

³ *Ibid*, h 57.

dan eksperimen psikologi belajar pun diarahkan pada tercapainya pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai proses perubahan manusia⁴.

Dalam konteks psikologi pembelajaran, pengertian tentang belajar, amat beragam. Beragamnya pengertian tentang belajar, dipengaruhi oleh teori yang melandasi rumusan belajar itu sendiri. Banyak orang beranggapan bahwa belajar semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang terjadi dalam bentuk informasi atau materi pelajaran. Anggapan seperti itu mungkin tidak sepenuhnya keliru, karena praktiknya banyak orang yang belajar dengan hanya menghafal. Padahal, menghafal hanya salah satu bagian dari beberapa cara belajar. Sesungguhnya konsep belajar tidak sesederhana itu.

Dalam perspektif psikologi, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga berarti suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa belajar terkait erat dengan perubahan tingkah laku. Istilah “perubahan” dalam pengertian di atas, tidak menunjukkan bahwa semua perubahan dalam arti belajar. Banyak sekali perubahan dalam diri individu tetapi bukan karena proses belajar. Misalnya, individu yang sedang mabuk terjadilah perubahan atas dirinya, tetapi perubahan

⁴ Tohirin, *Spikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan Kompetensi)* (Jakarta:Raja Grapindo Persada,2005) , hlm 54.

itu bukan karena belajar. Contoh lain, anak-anak yang memanjat pohon lalu patah tulang tangannya sehingga menjadi bengkok, perubahan yang semacam itu bukan berarti perubahan belajar. Perubahan berarti belajar apabila: (1) perubahan yang terjadi secara sadar; (2) perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional; (3) perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif; (4) perubahan dalam belajar tidak bersifat sementara; (5) perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah; (6) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.

Sebuah contoh yang menggambarkan terjadinya perubahan oleh sebab belajar adalah sebagai berikut:

Seorang anak balita sedang mempelajari kata “kucing” dari ibunya. Ketika anak itu melihat kucing jantan, kecil dan berbulu hitam di rumahnya, ibunya berkata “itu kucing”, lalu anak itu menirukan perkataan ibunya “Itu kucing”. Citra kucing yang dilihat anak tersimpan dengan baik dalam memori anak. Dalam subsistem akal atau pikiran anak telah tersimpan pula item-item informasi lain seperti kata “bagus”, “suka” dan lain-lain yang pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Di lain waktu, anak balita tadi melihat kucing lain di luar rumahnya, dan ibunya bertanya, apa itu? Saat pertanyaan itu diterima, sistem akal anak tadi kembali berproses mencari jawaban, dan hasilnya di luar jangkauan. Ternyata bukan kata “kucing” yang diperoleh ibunya, melainkan juga kata “bagus” dan kata “suka” dalam susunan kalimat yang logis. Anak menjawab “Itu kucing bagus, Bu, saya suka”. Padahal susunan kalimat yang melibatkan tiga kata (kucing, bagus dan

suka) tidak pernah ia pelajari. Bahkan kucing yang ia lihat di luar rumahnya pun berbeda jenis kelamin dan warnanya.

Berdasarkan contoh di atas, meskipun cenderung kepada contoh perkembangan kemampuan berbahasa, Anda bisa mengembangkan contoh lain untuk melihat perubahan tingkah laku oleh sebab belajar, termasuk tingkah laku keagamaan anak-anak di lingkungan rumah tangga atau di lingkungan sekolah.

Contoh di atas menunjukkan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan proses kognitif yang memperoleh dukungan dari fungsi ranah psikomotor. Fungsi psikomotor dalam hal ini mendengar, melihat, mengucapkan. Apa pun jenis dan manifestasi belajar yang dilakukan siswa, hampir dapat dipastikan selalu melibatkan fungsi ranah akal yang intensitas penggunaannya tentu berbeda dengan peristiwa belajar lainnya.

Seorang siswa atau individu yang telah melalui proses belajar, idealnya ditandai oleh munculnya pengalaman-pengalaman psikologi dan baru yang positif. Pengalaman-pengalaman yang bersifat kejiwaan tersebut diharapkan dapat mengembangkan aneka ragam sifat, sikap dan kecakapan yang konstruktif, bukan kecakapan yang destruktif. Dalam perspektif Islam, kecakapan yang konstruktif ini bisa dilihat misalnya, individu sebelumnya tidak mampu atau belum bisa melaksanakan wudhu dan shalat. Setelah melalui proses belajar, individu yang bersangkutan menjadi terampil dan terbiasa melaksanakan wudhu dan shalat.

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar perspektif psikologi, dalam konteks Islam maknanya lebih dalam, karena perubahan perilaku dalam Islam

indikatornya adalah akhlak yang sempurna. Akhlak yang sempurna mesti dilandasi oleh ajaran Islam. Dengan demikian, perubahan perilaku sebagai hasil belajar dalam perspektif Islam adalah perilaku individu Muslim yang paripurna sebagai cerminan dari pengalaman terhadap seluruh ajaran Islam.

2. Teori Belajar

Secara pragmatis, teori belajar dapat dipahami sebagai prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Di antara sekian banyak teori yang berdasarkan hasil eksperimen terdapat tiga macam yang sangat menonjol, yakni: *Connectionism*, *Classical Conditioning* dan *Operant Conditioning*. Teori-teori tersebut merupakan ilham yang mendorong para ahli melakukan eksperimen-eksperimen lainnya untuk mengembangkan para ahli teori-teori baru yang juga berkaitan dengan belajar seperti *Contiguous Conditioning* (Guthrie), *Sign Learning* (Tolman), *Gestalt Theory*, dan lain sebagainya⁵.

a) Connectionism (Koneksionisme)

Teori koneksionisme (*connectionism*) adalah teori yang ditemukan dan dikembangkan oleh Edward L. Thorndike (1874-1949) berdasarkan eksperimen yang ia lakukan pada tahun 1890-an. Eksperimen Thorndike ini

⁵ *Ibid*, h 63.

menggunakan hewan-hewan terutama kucing untuk mengetahui fenomena belajar.

Seekor kucing yang lapar ditempatkan dalam sangkar berbentuk kotak berjeruji yang dilengkapi dengan peralatan, seperti pengungkit, gerendel pintu, dan tali yang menghubungkan pengungkit dengan gerendel tersebut. peralatan ini ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan kucing tersebut memperoleh makanan yang tersedia di depan sangkar tadi.

Keadaan bagian dalam sangkar yang disebut *puzzle box* (peti teka-taki) itu merupakan situasi stimulus yang merangsang kucing untuk bereaksi melepaskan diri dan memperoleh makanan yang ada di muka pintu. Mula-mula kucing tersebut mengeong, mencakar, melompat, dan berlari-larian, namun gagal membuka pintu untuk memperoleh makanan yang ada di depannya. Akhirnya, entah bagaimana, secara kebetulan kucing itu berhasil menekan pengungkit dan terbukalah pintu sangkar tersebut. Eksperimen *puzzle box* ini kemudian terkenal dengan nama *instrumental conditioning*. Artinya, tingkah laku yang dipelajari sebagai instrumental (penolong) untuk mencapai hasil atau ganjaran yang dikehendaki.

Berdasarkan eksperimen di atas, Thorndike berkesimpulan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respons. Itulah sebabnya teori koneksionisme juga disebut “*S-R Bond Theory*” dan “*S-R Psychology of Learning*” selain itu, teori ini juga terkenal dengan sebutan “*Trial and Error Learning*”. Istilah ini menunjukan pada panjangnya waktu atau banyaknya

jumlah kekeliruan dalam mencapai suatu tujuan. Apabila kita perhatikan dengan seksama, dalam eksperimen Thorndike tadi akan kita dapati dua hal pokok yang mendorong timbulnya fenomena belajar.

Pertama, keadaan kucing yang lapar. Seandainya kucing itu kenyang, sudah tentu tak akan berusaha keras untuk keluar. Bahkan, barang kali ia akan tidur saja dalam *puzzle box* yang mengurungnya. Dengan kata lain, kucing itu tidak akan menampakkan gejala belajar untuk keluar. Sehubungan dengan hal ini, hampir dapat dipastikan bahwa motivasi (seperti rasa lapar) merupakan hal yang sangat vital dalam belajar.

Kedua, tersedianya makanan di muka pintu *puzzle box*. Makanan ini merupakan efek positif atau memuaskan yang dicapai oleh respons dan kemudian menjadi dasar timbulnya hukum belajar yang disebut *law of effect*. Artinya, jika sebuah respons menghasilkan efek yang memuaskan, hubungan antara stimulus dan respons akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan (mengganggu) efek yang dicapai respons, semakin lemah pula hubungan stimulus dan respons tersebut. Hukum belajar inilah yang mengilhami munculnya konsep *reinforcer* dalam teori *Operant Conditioning* hasil penemuan B.F Skinner.

Di samping *law of effect*, Thorndike juga mengemukakan dua macam hukum lainnya yang masing-masing disebut *law of readiness* dan *law of exercise*, sekarang, kedua macam hukum ini sesungguhnya tidak begitu populer, namun cukup berguna sebagai tambahan kajian dan perbandingan.

Law of readiness (hukum kesiapsiagaan) pada prinsipnya hanya merupakan asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan *conduction units* (satuan perantaraan). Unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jelas, hukum ini semata-mata bersifat spekulatif dan menurut Reber hanya bersifat historis. Dalam hal ini perlu dicatat, bahwa ada kemiripan antara kecenderungan dalam *conduction units* tersebut dengan *self-regulation/self-direction* dalam peristiwa belajar seperti yang telah diuraikan.

Law of exercise (hukum latihan) ialah generalisasi atas *law of use* dan *law of disuse*. Menurut Hilgard & Bower, jika perilaku (perubahan hasil belajar) sering dilatih atau digunakan maka eksistensi perilaku tersebut akan semakin kuat (*law of use*). Sebaliknya, jika perilaku tadi tidak sering dilatih atau tidak digunakan maka ia akan terlupakan atau sekurang-kurangnya akan menurun (*law of disuse*).

b) Classical Conditionning (Pembiasaan Klasik)

Teori pembiasaan klasik (*classical conditioning*) ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Pada dasarnya *classical conditioning* adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut.

Kata *classical* yang mengawali nama teori ini semata-mata dipakai untuk menghargai karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang *conditioning* (upaya pembiasaan) dan untuk membedakannya dari teori *conditioning* lainnya. Selanjutnya, mungkin karena fungsinya, teori Pavlov ini juga dapat disebut *respondent conditioning* (pembiasaan yang dituntut).

Dalam eksperimennya, Pavlov menggunakan anjing untuk mengetahui hubungan-hubungan antara *conditioned stimulus* (CS), *unconditioned stimulus* (UCS), *conditioned response* (CR), *unconditioned response* (UCR). CS adalah rangsangan yang mampu mendatangkan respons yang dipelajari, sedangkan respons yang dipelajari itu sendiri disebut CR. Adapun UCS berarti rangsangan yang menimbulkan respons yang tidak dipelajari, dan respons yang tidak dipelajari itu disebut UCR.

Anjing percobaan itu mula-mula diikat sedemikian rupa dan pada salah satu kelenjar air liurnya diberi alat penampung cairan yang dihubungkan dengan pipa kecil (*tube*). Perlu diketahui bahwa sebelum dilatih (dikenai eksperimen), secara alami anjing itu selalu mengeluarkan air liur setiap kali mulutnya berisi makanan. Ketika bel dibunyikan, secara alami pula anjing itu menunjukkan reaksinya yang relevan, yakni tidak mengeluarkan air liur.

Kemudian, dilakukan eksperimen berupa latihan pembiasaan mendengarkan bel (CS) bersama-sama dengan pemberian makanan berupa serbuk daging (UCS). Setelah latihan yang berulang-berulang ini selesai, suara bel tadi (CS) diperdengarkan lagi tanpa disertai makanan (UCS).

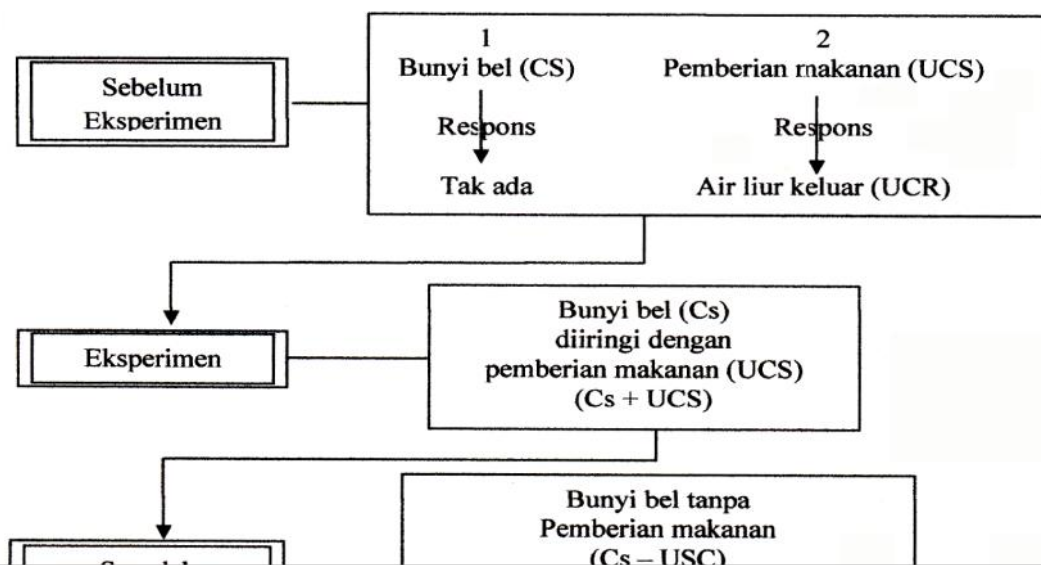
Apakah yang terjadi? Ternyata anjing percobaan tadi mengeluarkan air liur juga (CR), meskipun hanya mendengarkan bel (CS). Jadi, CS menghasilkan CR apabila CS dan UCS telah berkali-kali dihadirkan bersama-sama.

Agar lebih jelas, pada halaman berikut ini penyusun gambarkan proses terjadinya hubungan antara stimulus dan respons tersebut baik yang *unconditioned* (secara alami) maupun yang *conditioned* (buatan/yang dibiasakan).

Berdasarkan eksperimen tersebut, semakin jelaslah bahwa belajar adalah perubahan yang ditandai dengan adanya hubungan antara stimulus dan respons. Jadi, pada prinsipnya hasil eksperimen E.L. Thorndike di muka kurang lebih sama dengan hasil eksperimen Pavlov yang memang dianggap sebagai pendahulu dan anutan Thorndike yang behavioristik itu. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil eksperimen Pavlov ialah apabila stimulus yang diadakan (CS) selalu disertai dengan stimulus penguat (UCS), stimulus tadi (CS) cepat atau lambat akhirnya akan menimbulkan respons atau perubahan yang kita kehendaki yang dalam hal ini (CR)

GAMBAR 1

Bagan Eksperimen Pembiasaan Klasik



Selanjutnya, Skinner berpendapat bahwa proses belajar yang

berlangsung dalam eksperimen Pavlov itu tunduk terhadap dua macam hukum yang berbeda, yakni: *law of respondent conditioning* dan *law of respondent extinction*. Secara harfiah, *law of respondent conditioning* berarti hukum pembiasaan yang dituntut sedangkan *law of respondent extinction* adalah hukum pemusnahan yang dituntut.

Menurut Hintzman, yang dimaksud dengan *law of respondent conditioning* ialah jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan (yang salah satunya berfungsi sebagai (*reinforcer*) maka refleks ketiga yang terbentuk dari respons atas penguatan refleks dan stimulus lainnya meningkat. Yang dimaksud dengan dua stimulus tadi adalah CS dan UCS, sedangkan refleks ketiga adalah hubungan antara CS dan CR. Sebaliknya, *law of respondent extinction* ialah jika refleks yang sudah diperkuat melalui *respondent conditioning* itu kedatangan kembali tanpa menghadirkan *reinforce*, maka kekuatannya akan menurun.

Pandangan Penulis tentang pendapat/eksperimen Pavlov adalah bahwa dalam belajar mengajar perlu adanya respon, untuk lebih menarik minat dan perhatian anak didik.

c) Operant Conditioning (Pembiasaan Perilaku Respons)

Teori pembiasaan perilaku respons (*operant conditioning*) ini merupakan teori belajar yang berusia paling muda dan masih sangat berpengaruh di kalangan para ahli psikologi belajar masa kini. Penciptanya bernama Burrhus Frederic Skinner, seorang penganut behaviorisme yang dianggap kontroversial. Karya tulisnya yang dianggap baru/terakhir berjudul *About Behaviorism* diterbitkan pada tahun 1974. Tema pokok yang mewarnai karya-karyanya adalah bahwa tingkah laku itu terbentuk oleh konsekuensi-konsekuensi yang timbul oleh tingkah laku itu sendiri.

Operant adalah sejumlah perilaku atau respons yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan yang dekat. Tidak seperti dalam *respondent conditioning* (yang responsnya didatangkan oleh stimulus tertentu), respons dalam *operant conditioning* terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh *reinforcer*. *Reinforcer* itu sendiri sesungguhnya adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respons tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus lainnya seperti dalam hal *classical respondent conditioning*.

Dalam salah satu eksperimennya, Skinner menggunakan seekor tikus yang ditempatkan dalam sebuah peti yang kemudian terkenal dengan nama “Skinner Box”. Peti sangkar ini terdiri atas dua macam komponen pokok, yakni: *manipulandum* dan alat pemberi *reinforcement* yang antara lain berupa wadah makanan. *Manipulandum* adalah komponen yang dapat dimanipulasi

dan gerakannya berhubungan dengan *reinforcement*. Komponen ini terdiri atas tombol, batang jeruji, dan pengungkit.

Dalam eksperimen tadi mula-mula itu mengeksplorasi peti sangkar dengan cara lari ke sana kemari, mencium benda-benda yang ada disekitarnya, mencakar dinding, dan sebagainya. Aksi-aksi seperti ini disebut “*emitted behavior*” (tingkah laku yang terpancar), yakni tingkah laku yang terpancar dari organisme tanpa memperdulikan stimulus tertentu. Kemudian pada gilirannya, secara kebetulan salah satu *emitted behavior* tersebut (seperti cakaran kaki depan atau sentuhan moncong) dapat menekan pengungkit. Tekanan pengungkit ini mengakibatkan munculnya butir-butir makanan ke dalam wadahnya.

Butir-butir makanan yang muncul itu merupakan *reinforcer* bagi penekanan pengungkit. Penekanan pengungkit inilah yang disebut tingkah laku *operant* yang terus meningkat apabila diiringi dengan *reinforcement*, yakni penguatan berupa butir-butir makanan yang muncul pada wadah makanan.

Jelas sekali bahwa eksperimen Skinner di atas mirip sekali dengan *trial and error learning* yang ditemukan oleh Thorndike. Dalam hal ini, fenomena tingkah laku belajar menurut Thorndike selalu melibatkan *satisfaction*/kepuasan, sedangkan menurut Skinner fenomena tersebut melibatkan *reinforcement*/penguatan. Dengan demikian, baik belajar dalam

teori S-R Bond maupun teori *operant conditioning* langsung atau tidak, keduanya mengakui arti penting *law of effect*.

Selanjutnya, proses belajar dalam teori *operant conditioning* juga tunduk kepada dua hukum *operant* yang berbeda, yakni: *law of operant conditioning* dan *law of operant extinction*. Menurut *law of operant conditioning*, jika timbulnya tingkah laku *operant* diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan tingkah laku tersebut akan meningkat. Sebaliknya, menurut *law of operant extinction*, jika timbulnya tingkah laku *operant* yang telah diperkuat melalui proses *conditioning* itu tidak diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan tingkah laku tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Hukum-hukum ini pada dasarnya sama saja dengan hukum-hukum yang melekat dalam proses belajar menurut teori pembiasaan yang klasik.

Teori-teori belajar hasil eksperimen Thorndike, Skinner, dan Pavlov di atas secara prinsipal bersifat behavioristik dalam arti lebih menekankan timbulnya perilaku jasmaniah yang nyata dan dapat diukur. Teori-teori itu juga bersifat otomatis-mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respons, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Jika kita renungkan dan bandingkan dengan teori juga temuan riset psikologi kognitif, karakteristik belajar yang terdapat dalam teori-teori behavioristik yang terlanjur diyakini sebagian besar ahli pendidikan kita itu, sesungguhnya mengandung banyak kelemahan.

Di antara kelemahan-kelemahan teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Proses belajar itu dipandang dapat diamati secara langsung, padahal belajar adalah proses kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar kecuali sebagian gejalanya.
- b. Proses belajar itu dipandang bersifat otomatis-mekanis, sehingga terkesan seperti gerakan mesin dan robot, padahal setiap siswa *self-regulation* (kemampuan mengatur diri sendiri) dan *self control* (pengendalian diri) yang bersifat kognitif, dan karenanya ia bisa menolak, merespons jika ia tidak menghendaki, misalnya karena lelah atau berlawanan dengan kata hati.
- c. Proses belajar manusia yang dianalogikan dengan perilaku hewan itu sangat sulit diterima, mengingat amat mencoloknya perbedaan antara karakter fisik dan psikis manusia dengan karakter fisik dan psikis hewan.

d) Contiguous Conditioning (Pembiasaan Asosiasi Dekat)

Teori belajar pembiasaan asosiasi dekat (*contiguous conditioning*) adalah sebuah teori belajar yang mengasumsikan terjadinya peristiwa belajar berdasarkan *kedekatan hubungan* antara stimulus dengan respons yang relevan. *Contiguous conditioning* sering disebut sebagai teori belajar istimewa dalam arti paling sederhana dan efisien, karena di dalam hanya

terdapat satu prinsip, yaitu kontiguitas (*contiguity*) yang berarti kedekatan asosiasi antar stimulus-respons.

Menurut teori ini, apa yang sesungguhnya dipelajari orang, misalnya seseorang siswa, adalah reaksi atau respons terakhir yang muncul atas sebuah rangsangan atau stimulus. Artinya, setiap peristiwa belajar hanya mungkin terjadi hanya sekali saja untuk selamanya atau sama sekali tak terjadi. Dalam pandangan penemu teori tersebut yakni Edwin R. Guthrie, peningkatan berangsur-angsur kinerja hasil belajar yang lazim dicapai seorang siswa bukanlah hasil dari berbagai respons kompleks terhadap stimulus-stimulus sebagaimana yang diyakini para behavioris lainnya, melainkan karena dekatnya asosiasi antara stimulus dengan respons yang diperlukan.

Dalam kenyataan sehari-hari, memang acapkali terjadi peristiwa belajar dengan *contiguous conditioning* sederhana seperti mengasosiasikan $2 + 2$ dengan 4; mengasosiasikan kewajiban di bulan ramadhan dengan puasa; dan mengasosiasikan 17 Agustus dengan Hari Kemerdekaan RI. Belajar dengan kontiguitas sederhana seperti asosiasi-asosiasi tersebut dapat terjadi misalnya dengan menyajikan stimulus-stimulus berikut ini;

Dua tambah dua sama dengan.....

Kewajiban di bulan ramadhan adalah.....

Tanggal 17 Agustus adalah.....

Sudah barang tentu tak dapat dipungkiri, bahwa kegiatan para siswa melengkapi kalimat-kalimat di atas dengan kata-kata *empat*, *berpuasa*, dan *Hari Kemerdekaan RI* menunjukkan adanya peristiwa belajar dalam diri para siswa tersebut.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa teori belajar *contiguous conditioning* sebagai salah satu cabang mazhab behaviorisme itu tak dapat diterima begitu saja terutama mengingat kecenderungannya yang serba mekanis dan otomatis seperti robot atau mesin. Padahal, dalam kebanyakan proses belajar yang dialami manusia, peranan *insight*, ‘tilikan akal’ dan *information processing*, ‘tahapan pengolahan informasi’ baik disadari atau tidak selalu terjadi dalam diri setiap siswa yang sedang mengalami peristiwa belajar. Sehubungan dengan ini, Hilgard & Bower menyatakan bahwa meskipun kepercayaan terhadap teori *contiguous conditioning* akan lanjut terus, namun teori tersebut sebenarnya telah kehilangan daya tarik bagi generasi penerus ahli psikologi belajar seiring dengan muncul dan populernya psikologi kognitif.

e) Cognitive Theory (Teori Kognitif)

Teori psikologi kognitif adalah bagian terpenting dari sains kognitif yang telah memberi kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan psikologi belajar. Sains kognitif merupakan himpunan disiplin terdiri dari atas

psikologi kognitif, ilmu-ilmu komputer, linguistik, intelegensi buatan, matematika, epistemologi, dan *neuropsychology* (psikologi syaraf).

Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti penting proses internal, mental manusia. Dalam pandangan para ahli kognitif, tingkah laku manusia yang tampak tak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, yakni: motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya.

Meskipun pendekatan kognitif sering dipertentangkan dengan pendekatan *behavioristik*, tidak berarti psikologi kognitif anti terhadap aliran *behaviorisme*. Hanya, menurut para ahli psikologi kognitif, aliran *behaviorisme* itu tidak lengkap sebagai sebuah teori psikologi, sebab tidak memperhatikan proses kejiwaan yang berdimensi ranah cipta seperti berpikir, mempertimbangkan pilihan dan mengambil keputusan. Selain ini, aliran *behaviorisme* juga tidak mau tahu urusan ranah rasa.

Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada dasarnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa *behavioral* (yang bersifat jasmaniah) meskipun hal-hal yang bersifat *behavioral* tampak lebih nyata dalam hampir setiap peristiwa belajar siswa. Secara lahiriah, seorang anak yang sedang belajar membaca dan menulis, misalnya, tentu menggunakan perangkat jasmaniah (dalam hal ini mulut dan tangan) untuk mengucapkan kata dan menggoreskan pena. Akan tetapi, perilaku mengucap kata-kata dan menggoreskan pena yang dilakukan anak tersebut bukan semata-mata respons

atas stimulus yang ada, melainkan yang lebih penting karena dorongan mental yang diatur oleh otaknya.

Sehubungan dengan hal ini, Piaget, seorang pakar psikologi kognitif terkemuka, menyimpulkan: . . . *children have a built-in desire to learn*. Ungkapan ini bermakna bahwa semenjak kelahirannya, setiap anak manusia memiliki kebutuhan yang melekat dalam dirinya sendiri untuk belajar.

Sementara itu, teori filsafat pragmatisme yang dipelopori oleh William James dan teori-teori belajar yang bersumber dari eksperimen Pavlov, Thorndike, dan Skinner, telah diambil sebagai landasan psikologi aliran *behaviorisme* dibawah kepemimpinan Jhon Broadus Watson. Aliran *behaviorisme* yang terkenal radikal dan menentang itu kini sedang mengalami fase keruntuhannya. Karena kini semakin banyak pakar psikologi kelas dunia yang merasa tidak puas terhadap teori-teori behavioristik, apalagi setelah dibandingkan dengan hasil-hasil riset para psikologi.

Di antara keyakinan prinsipal yang terdapat dalam teori behavioristik ialah setiap anak manusia lahir tanpa warisan kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan, dan warisan abstrak lainnya. Semua kecakapan, kecerdasan, dan bahkan perasaan baru timbul setelah manusia melakukan kontak dengan alam sekitar terutama alam pendidikan. Artinya, seorang individu manusia bisa pintar, terampil, dan berperasaan hanya bergantung pada bagaimana individu itu dididik.

Keyakinan prinsipal lainnya yang dianut oleh para behavioris adalah peranan “refleks”, yakni reaksi jasmaniah yang dianggap tidak memerlukan kesadaran mental. Apa pun yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan belajar adalah kegiatan refleks belaka, yaitu reaksi manusia atas rangsangan-rangsangan yang ada. Refleks-refleks ini jika di latih akan menjadi keterampilan-keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang dikuasai manusia. Jadi, peristiwa belajar seorang siswa menurut para behavioris adalah peristiwa melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai siswa tersebut.

Dalam perspektif psikologi kognitif, peristiwa belajar yang digambarkan tadi adalah naif (terlalu sederhana dan tak masuk akal) dan sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Sebagai bukti dan bahan perbandingan, berikut ini penyusun kemukakan dua contoh kritik terhadap kepercayaan behavioristik tadi.

Pertama, memang tak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan pada umumnya berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Seorang siswa lazimnya menyalin pelajaran, juga dengan kebiasaan. Gerakan tangan dan goresan pena yang dilakukan siswa tersebut demikian lancarnya karena sudah terbiasa menulis sejak tahun pertama masuk sekolah.

Namun demikian, perlu diingat bahwa sebelum siswa tadi menyalin pelajaran dengan cara yang biasa ia lakukan, tentu terlebih dahulu ia membuat keputusan apakah ia akan menyalin pelajaran sekarang, nanti, atau sama

sekali tidak. Jadi, kebiasaan dapat berfungsi sebagai pelaksana aktivitas menyalin pelajaran dari awal hingga akhir, sedangkan “keputusan” berfungsi menetapkan dimulainya aktivitas menyalin pelajaran oleh siswa tadi dengan kebiasaan yang ia kuasai. Keputusan tersebut tentu bukan peristiwa behavioral melainkan peristiwa mental siswa itu sendiri.

Kedua, kebiasaan belajar seorang siswa dapat ditiadakan oleh kemauan siswa itu sendiri. Contohnya: menurut kebiasaan, seorang siswa misalnya belajar seharian di perpustakaan sambil mengunyah permen. Tetapi, ketika tiba saat berpuasa pada bulan ramadhan ia hanya belajar setengah hari dengan tidak mengunyah permen. Dalam hal ini, pengurangan alokasi waktu belajar dan penghentian kebiasaan mengunyah permen merupakan kemauan siswa tersebut karena sedang menunaikan ibadah puasa. Kemauan siswa itu tentu bukan perilaku behavioral melainkan peristiwa mental (konatif), meskipun secara lahiriah yang menerima akibat kemauan tersebut adalah perilaku behavioral.

Dari uraian contoh-contoh di atas, semakin jelaslah bahwa perilaku belajar itu, dalam hampir semua bentuk dan manifestasinya, bukan sekedar peristiwa S-R Bond (ikatan antara stimulus dan respons) melainkan lebih banyak melibatkan proses kognitif. Hanya dalam peristiwa belajar tertentu yang sangat terbatas ruang lingkupnya (umpamanya belajar meniru sopan santun di meja makan dan bertegur sapa), peranan ranah cipta siswa tidak menonjol.

f) Social Learning Theory (Teori Belajar Sosial)

Teori belajar sosial yang juga masyhur dengan sebutan teori *observational learning*, ‘belajar observasional/dengan pengamatan’ itu adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Tokoh utama teori ini adalah Albert Bandura, seorang psikolog pada Universitas Stanford Amerika Serikat, yang oleh banyak ahli dianggap sebagai seorang behavioris masa kini yang moderat. Tidak seperti rekan-rekannya sesama penganut aliran behaviorisme, Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus (S-R bond), melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri.

Prinsip dasar belajar hasil temuan Bandura termasuk belajar sosial dan moral. Menurut Barlow, sebagian besar dari yang dipelajari manusia terjadi melalui peniruan (*imitation*) dan penyajian contoh perilaku (*modeling*). Dalam hal ini, seorang siswa belajar mengubah perilakunya sendiri melalui penyaksian cara orang atau sekelompok orang mereaksi atau merespons sebuah stimulus tertentu. Siswa ini juga dapat mempelajari respons-respons baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku contoh dari orang lain, misalnya guru atau orang tuanya.

Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya *conditioning* (pembiasaan

merespons) dan *imitation* (peniruan). Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur-prosedur belajar sosial dan moral tersebut adalah seperti terurai dibawah ini.

Conditioning. Menurut prinsip-prinsip kondisioning, prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-perilaku lainnya, yakni dengan *reward* (ganjaran/memberi hadiah atau mengganjar) dan *punishment* (hukuman/memberi hukuman). Dasar pemikirannya ialah sekali seorang siswa mempelajari perbedaan antara perilaku-perilaku yang menghasilkan ganjaran (*reward*) dengan perilaku-perilaku yang mengakibatkan hukuman (*punishment*), ia sentiasa berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu ia perbuat.

Sehubungan dengan hal di atas, komentar-komentar yang disampaikan orang tua atau guru ketika mengganjar/menghukum siswa merupakan faktor yang penting untuk proses internalisasi atau penghayatan siswa tersebut terhadap *moral standards* (patokan-patokan moral). Orang tua dan guru dalam hal ini sangat diharapkan memberi penjelasan agar siswa tersebut benar-benar paham mengenai jenis perilaku mana yang menghasilkan ganjaran dan jenis perilaku mana yang menimbulkan sanksi.

Reaksi-reaksi seorang siswa terhadap stimulus yang ia pelajari adalah hasil dari pembiasaan merespons sesuai dengan kebutuhan. Melalui proses pembiasaan merespons (*conditioning*) ini, ia juga menemukan pemahaman

bahwa ia dapat menghindari hukuman dengan memohon maaf yang sebaik-baiknya agar kelak terhindar dari sanksi.

Imitation. Prosedur lain yang juga penting dan menjadi bagian yang *integral* dengan prosedur-prosedur belajar menurut teori *social learning*, ialah proses imitasi atau peniruan. Dalam hal ini, orang tua dan guru seyogiannya memainkan peran penting sebagai seorang model atau tokoh yang dijadikan contoh berperilaku sosial dan moral bagi siswa.

Sebagai contoh, mula-mula seorang siswa mengamati model gurunya sendiri yang sedang melakukan sebuah perilaku sosial, umpamanya menerima seorang tamu. Lalu, perbuatan menjawab salam, berjabat tangan, beramah tamah, dan seterusnya yang dilakukan model itu diserap oleh memori siswa tersebut. diharapkan, cepat atau lambat siswa tersebut mampu meniru sebaik-baiknya perbuatan sosial yang dicontohkan oleh modelnya itu.

Kualitas kemampuan siswa dalam melakukan perilaku sosial hasil pengamatan terhadap model tersebut, antara lain bergantung pada ketajaman persepsinya mengenai ganjaran dan hukuman yang berkaitan dengan benar dan salahnya perilaku yang ia tiru dari model tadi. Selain itu, tingkat kualitas imitasi tersebut juga tergantung pada persepsi siswa terhadap “siapa” yang menjadi model. Maksudnya, semakin piawai dan berwibawa seorang model, semakin tinggi pula kualitas imitasi perilaku sosial dan moral siswa tersebut.

3. Belajar Menurut Pandangan Islam

Amat banyak pengertian pendidikan Islam yang telah dikemukakan oleh para pakar pendidikan Islam. Dalam bagian ini, hanya dikemukakan beberapa pengertian saja. Abdurrahman an-Nahlawi menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah penataan individual dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk taat pada Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Oemar Muhammad al-Toumy al-Syaebani menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku individu dilandasi oleh nilai-nilai islami dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses kependidikan. Mohammad Fadil al-Djamaly, menyatakan bahwa kependidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan mengangkat derajat kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar). Imam Bawani menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hokum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

4. Kewajiban Belajar dalam Islam

Dalam Islam mencari ilmu adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar mulai dari buaian sampai liang lahad. Menurut ilmu wajib bagi muslim dan muslimat. Nabi SAW bersabda : Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Hal ini juga sesuai

dengan konteks pendidikan yang telah dikonsep oleh UNESCO bahwa orang hidup harus mencari ilmu (*long life education*). Zarnuji dalam kitab ini menjelaskan bahwa bukan semua ilmu yang wajib dituntut oleh seorang muslim, tetapi yang wajib baginya adalah menuntut *ilmu hal* (ilmu yang menyangkut kewajiban sehari-hari sebagai muslim, seperti tauhid, akhlak, dan fikih) beliau mengutip hadis :

Wajib pula bagi muslim mempelajari ilmu yang menjadi prasyarat untuk menunaikan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian wajib baginya mempelajari ilmu mengenai jual beli bila berdagang. Wajib pula mempelajari ilmu yang berhubungan dengan orang lain dan berbagai pekerjaan. Maka setiap orang yang terjun pada suatu profesi harus mempelajari ilmu yang menghindarkannya dari perbuatan haram di dalamnya.

Kemudian setiap muslim wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hati, seperti *tawakkal* (pasrah kepada Allah), *inabah* (kembali kepada Allah) , *khauf* (takut kepada murka Allah), dan *rida* (rela atas apa yang ditakdirkan Allah atas dirinya).

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita bedakan menjadi tiga macam, yakni:

- 1) Faktor *internal* (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa;
- 2) Faktor *eksternal* (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa;
- 3) Faktor *pendekatan belajar* (approach to learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.

Faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa yang bersikap *conserving* terhadap ilmu pengetahuan atau bermotif ekstrinsik (faktor eksternal) umpamanya, biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya, seorang siswa yang berintelegensi tinggi (faktor internal) dan mendapat dorongan positif dari orang tuanya (faktor eksternal), mungkin akan memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil belajar. Jadi, karena pengaruh faktor-faktor tersebut di ataslah, muncul siswa-siswa yang *high-achievers* (berprestasi tinggi) dan *under-achievers* (berprestasi rendah) atau gagal sama sekali. Dalam hal ini, seorang guru yang kompeten dan profesional diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya kelompok siswa yang menunjukkan gejala kegagalan dengan berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses belajar mereka⁶.

1. *Faktor Internal Siswa*

⁶ Muhibbin Syah. *Psikologi Belajar* (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h 145.

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi dua aspek, yakni, 1) aspek *fisiologis* (yang bersifat jasmaniah); 2) aspek *psikologis* (yang bersifat rohaniyah).

a. Aspek Fisiologis

Kondisi umum jasmani dan *tonus* (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi jika disertai pusing kepala berat misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas. Untuk mempertahankan *tonus* jasmani agar tetap bugar, siswa sangat dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Selain itu, siswa juga dianjurkan memilih pola istirahat dan olah raga ringan yang sedapat mungkin terjadwal secara tetap dan berkesinambungan. Hal ini penting sebab kesalahan pola makan-minum dan istirahat akan menimbulkan reaksi *tonus* yang negatif dan merugikan semangat mental siswa itu sendiri.

Kondisi organ-organ khusus siswa, seperti tingkat kesehatan indera pendengar dan indera penglihatan, juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya yang disajikan di kelas. Daya pendengaran dalam penglihatan siswa yang rendah, umpamanya, akan menyulitkan *sensory register* dalam menyerap item-item informasi yang bersifat *echoic* dan *iconic* (gema dan citra). Akibat negatif

selanjutnya adalah terhambatnya proses informasi yang dilakukan oleh sistem memori siswa tersebut.

Untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah mata dan telinga di atas, selaku guru yang profesional seyogianya bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memperoleh bantuan pemeriksaan rutin (periodik) dari dinas-dinas kesehatan setempat. Kiat lain tak kalah penting untuk mengatasi kurang sempurna pendengaran dan penglihatan siswa-siswa tertentu itu ialah dengan menempatkan mereka dideretan bangku terdepan secara bijaksana. Artinya, anda tidak perlu menunjukkan sikap dan alasan (apalagi di depan umum) bahwa mereka ditempatkan di depan kelas karena kekurangbaikan mata dan telinga mereka. Langkah bijaksana ini perlu diambil untuk mempertahankan *self-esteem* dan *self-confidence* siswa-siswa khusus tersebut. Kemerosotan *self-esteem* dan *self-confidence* (rasa percaya diri) seorang siswa akan menimbulkan frustrasi yang pada gilirannya cepat atau lambat siswa tersebut akan menjadi *under-achiever* atau mungkin gagal, meskipun kapasitas kognitif mereka normal atau lebih tinggi dari pada teman-temannya.

b. Aspek Psikologis

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa. Namun, di antara faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang lebih

esensial itu adalah sebagai berikut: 1) tingkat kecerdasan/intelegensi siswa; 2) sikap siswa; 3) bakat siswa; 4) minat siswa; 5) motivasi siswa.

Inteligensi Siswa

Inteligensi siswa pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Jadi, inteligensi sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Akan tetapi, memang harus diakui bahwa peran otak dalam hubungannya dengan inteligensi manusia lebih menonjol daripada peran organ-organ tubuh lainnya, lantaran otak merupakan “menara pengontrol” hampir seluruh aktivitas manusia.

Tingkat kecerdasan atau inteligensi (IQ) siswa tak dapat diragukan lagi, sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Ini bermakna, semakin tinggi kemampuan inteligensi seorang siswa maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelegensi seorang siswa maka semakin kecil peluangnya untuk memperoleh sukses.

Selanjutnya, di antara siswa-siswa yang mayoritas berintelegensi normal itu mungkin terdapat satu atau dua orang yang tergolong *gifted child* atau *talented child*, yakni anak sangat cerdas dan anak sangat berbakat (IQ di atas 130). Disamping itu, mungkin ada pula siswa yang berkecerdasan di bawah batas rata-rata (IQ 70 ke bawah). Menghadapi situasi seperti ini, apa sebaiknya anda lakukan?

Setiap calon guru dan guru profesional sepantasnya menyadari bahwa keluarbiasaan inteligensi siswa, baik yang positif seperti *superior* maupun yang negatif seperti *borderline*, lazimnya menimbulkan kesulitan belajar siswa yang bersangkutan. Di satu sisi siswa yang cerdas sekali akan merasa tidak mendapat perhatian yang memadai dari sekolah karena pelajaran yang disajikan terlampau mudah baginya. Akibatnya, ia menjadi bosan dan frustrasi karena tuntutan kebutuhan keingintahuannya (*curiosity*) merasa dibendung secara tidak adil. Di sisi lain, siswa yang bodoh sekali akan merasa sangat payah mengikuti sajian pelajaran karena terlalu sukar baginya. Karenanya siswa itu sangat tertekan, dan akhirnya merasa bosan dan frustrasi seperti yang di alami rekannya yang luar biasa positif tadi.

Untuk menolong siswa yang berbakat, sebaiknya anda menaikkan kelasnya setingkat lebih tinggi dari pada kelasnya sekarang. Kelak, apabila ternyata di kelas barunya itu dia masih merasa terlalu mudah juga, siswa tersebut dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya, hingga dia mendapatkan kelas yang tingkat kesulitan mata pelajarannya sesuai dengan tingkat inteligensinya. Apabila cara tersebut sulit ditempuh, alternatif lain dapat diambil, misalnya dengan cara menyerahkan siswa tersebut kepada lembaga pendidikan khusus untuk para siswa berbakat.

Sementara itu, untuk menolong siswa yang berkecerdasan di bawah normal, tak dapat dilakukan sebaliknya yakni dengan menurunkan ke kelas yang lebih rendah. Sebab, cara penurunan kelas seperti ini dapat

menimbulkan masalah baru yang bersifat psiko-sosial yang tidak hanya mengganggu dirinya saja, tetapi mengganggu “adik-adik” barunya.

Oleh karena itu, tindakan yang dipandang lebih bijaksana adalah dengan cara memindahkan siswa para penyandang inteligensi tersebut ke lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak penyandang “kemalangan” IQ. Sayangnya, lembaga pendidikan khusus anak-anak malang, seperti juga lembaga pendidikan khusus anak-anak cemerlang, di negara kita baru ada di kota-kota besar tertentu saja.

Sikap Siswa

Sikap adalah gejala internal yang berdemensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons (*response tendency*) dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sikap (*attitude*) siswa yang positif, terutama kepada anda dan mata pelajaran yang anda sajikan merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar siswa tersebut. Sebaliknya, sikap negatif siswa terhadap anda dan mata pelajaran anda, apalagi jika yang diiringi kebencian kepada anda atau kepada mata pelajaran anda dapat menimbulkan kesulitan belajar siswa tersebut. selain itu, sikap terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat *conserving*, walaupun mungkin tidak menimbulkan kesulitan belajar, namun prestasi yang dicapai siswa akan kurang memuaskan.

Untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya sikap negatif siswa seperti tersebut di atas, guru dituntut untuk terlebih dahulu menunjukkan sikap positif terhadap dirinya sendiri dan terhadap mata pelajaran yang menjadi vakunya. Dalam hal bersikap positif terhadap mata pelajarannya, seorang guru sangat dianjurkan untuk sentiasa menghargai dan mencintai profesinya. Guru yang demikian tidak hanya menguasai bahan-bahan yang terdapat dalam bidang studinya, tetapi juga mampu menyakinkan kepada para siswa akan manfaat bidang studi itu bagi kehidupan mereka. Dengan meyakini manfaat bidang studi tertentu, siswa akan merasa membutuhkannya, dan dari perasaan butuh itulah diharapkan muncul sikap positif terhadap bidang studi tersebut sekaligus terhadap guru yang mengajarnya.

Bakat Siswa

Secara umum, bakat (*aptitude*) adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, sebetulnya setiap orang pasti memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi, secara global bakat itu mirip dengan inteligensi. Itulah sebabnya seorang anak yang berinteligensi sangat cerdas (*superior*) atau cerdas luar biasa (*very superior*) disebut juga sebagai *talented hild*, yakni anak berbakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, bakat kemudian diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Seorang siswa yang berbakat

dalam bidang elektronik, misalnya, akan jauh lebih mudah menyerap informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang tersebut dibanding dengan siswa lainnya. Inilah yang kemudian disebut bakat khusus (*specific aptitude*) yang konon tak dapat dipelajari karena merupakan karunia *inborn* (pembawaan sejak lahir).

Sehubungan dengan hal di atas, bakat akan dapat mempengaruhi tinggi-rendahnya prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu. Oleh karenanya adalah hal yang tidak bijaksana apabila orang tua memaksakan kehendaknya untuk menyekolahkan anaknya pada jurusan keahlian tertentu tanpa mengetahui terlebih dahulu bakat yang di miliki anaknya itu. Pemaksaan kehendak terhadap seorang siswa, dan juga ketidaksadaran siswa terhadap bakatnya sendiri sehingga ia memilih jurusan keahlian tertentu yang sebenarnya bukan bakatnya, akan mempengaruhi buruk terhadap kinerja akademik (*academic performance*) atau prestasi belajarnya.

Minat Siswa

Secara sederhana, minat (*interest*) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Reber, minat tidak termasuk istilah populer dalam psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal lainnya, seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan.

Namun terlepas dari masalah populer atau tidak, minat seperti yang dipahami dan dipakai oleh orang selama ini dapat mempengaruhi kualitas

pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu. Umpamanya, seorang siswa yang menaruh minat besar terhadap matematika akan memusatkan perhatiannya lebih banyak dari pada siswa lainnya. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. Guru dalam kaitan ini seyogianya berusaha membangkitkan minat siswa untuk menguasai pengetahuan yang terkandung dalam bidang studinya dengan cara yang kurang lebih sama dengan kiat membangun sikap positif seperti yang terurai di muka.

Motivasi Siswa

Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme baik manusia atau pun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini, motivasi berarti pemasok daya (*energizer*) untuk bertindak laku secara terarah.

Dalam perkembangan selanjutnya, motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) motivasi *intrinsik*; 2) motivasi *ekstrinsik*. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Termasuk dalam motivasi intrinsik siswa adalah perasaan menyenangkan materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan siswa yang bersangkutan.

Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Pujian dan hadiah, peraturan/tata tertib sekolah, suri teladan orang tua, guru, dan seterusnya merupakan contoh-contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat menolong siswa untuk belajar. Kekurangan atau ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal, akan menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam melakukan proses mempelajari materi-materi pelajaran baik di sekolah maupun di rumah.

Dalam perspektif psikologi kognitif, motivasi yang lebih signifikan bagi siswa adalah motivasi intrinsik karena lebih murni dan langgeng serta tidak bergantung pada dorongan atau pengaruh orang lain. Selanjutnya, dorongan mencapai prestasi dan dorongan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan juga memberi pengaruh kuat dan relatif lebih langgeng dibandingkan dengan dorongan hadiah atau dorongan keharusan dari orang tua.

2. *Faktor Eksternal Siswa*

Seperti faktor internal siswa, faktor eksternal siswa juga terdiri atas dua macam, yakni: faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan nonsosial.

a. *Lingkungan Sosial*

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa.

Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri teladan yang baik dan rajin khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa⁷.

Selanjutnya, yang termasuk lingkungan sosial siswa adalah masyarakat dan tetangga juga teman-teman sepermainan di sekitar perkampungan siswa tersebut. kondisi masyarakat di lingkungan kumuh (*slum area*) yang serba kekurangan dan anak-anak pengangguran, misalnya, akan sangat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa tersebut akan menemukan kesulitan ketika memerlukan teman belajar atau berdiskusi atau meminjam alat-alat belajar tertentu yang kebetulan belum dimilikinya.

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri . sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, dan demografi keluarga (letak rumah), semuanya dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai siswa. Contoh kebiasaan yang diterapkan orang tua siswa dalam mengelola keluarga (*family management practices*) yang keliru, seperti kelalaian orang tua memonitor kegiatan anak, dapat menimbulkan dampak lebih buruk lagi. Dalam hal ini, bukan saja anak tidak mau belajar melainkan juga ia cenderung berperilaku menyimpang, terutama perilaku menyimpang yang berat seperti antisosial.

⁷ *Ibid*, h 153.

b. Lingkungan Nonsosial

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.

Rumah yang sempit dan berantakan serta perkampungan yang terlalu padat dan tak memiliki sarana umum untuk kegiatan remaja (seperti lapangan voli) misalnya, akan mendorong siswa untuk berkeliaran ke tempat-tempat yang sebenarnya tak pantas dikunjungi. Kondisi rumah dan perkampungan seperti itu jelas berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa.

Khusus mengenai waktu yang disenangi untuk belajar (*study time preference*) seperti pagi atau sore hari, seorang ahli bernama J. Biggers berpendapat bahwa belajar pada pagi hari lebih efektif dari pada belajar pada waktu-waktu lainya. Namun, menurut penelitian beberapa ahli *learning style* (gaya belajar), hasil belajar itu tidak tergantung pada waktu secara mutlak, tetapi tergantung pada pilihan waktu yang cocok dengan kesiapsiagaan siswa. Di antara siswa ada yang siap belajar pagi hari, adapula yang siap pada sore hari, bahkan tengah malam. Perbedaan antara waktu dan kesiapan belajar inilah yang menimbulkan perbedaan *study time preference* antara seorang siswa dengan siswa lainnya.

Namun demikian, menurut hasil penelitian mengenai kinerja baca (*reading performance*) sekelompok mahasiswa disebuah universitas di Australia Selatan, tidak ada perbedaan yang berarti antara hasil membaca

pada pagi hari dan hasil membaca pada sore hari. Selain itu, keeratan korelasi antara *study time preference* dengan hasil membaca pun sulit dibuktikan. Bahkan mereka yang lebih senang belajar pada pagi hari dan dites pada sore hari, ternyata hasilnya tetap baik. Sebaliknya, adapun diantara mereka yang lebih suka belajar pada sore hari dan dites pada saat yang sama, namun hasilnya tidak memuaskan.

Dengan demikian, waktu yang digunakan siswa untuk belajar yang selama ini sering dipercaya berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, tak perlu dihiraukan. Sebab, bukan waktu yang penting dalam belajar melainkan kesiapan sistem memori siswa dalam menyerap, mengelola, dan menyimpan item-item informasi dan pengetahuan yang dipelajari siswa tersebut.

3. Faktor Pendekatan Belajar

Pendekatan belajar, seperti yang telah diuraikan secara panjang lebar pada subbab sebelumnya, dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efesiensi proses mempelajari materi tertentu. Strategi dalam hal ini berarti seperangkat langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu.

Di samping faktor-faktor internal dan eksternal siswa sebagaimana yang telah dipaparkan di muka, faktor pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap taraf keberhasilan proses belajar siswa tersebut. Seorang siswa yang terbiasa mengaplikasikan pendekatan belajar *deep* misalnya, mungkin sekali

berpeluang untuk meraih prestasi belajar yang bermutu daripada siswa yang menggunakan pendekatan belajar *surface* atau *reproductive*. Untuk memperjelas uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut di atas, berikut ini penyusunan sajian sebuah tabel.

TABEL 1

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar⁸

<i>Ragam Faktor dan Unsur-unsurnya</i>		
<i>Internal Siswa</i>	<i>Eksternal Siswa</i>	<i>Pendekatan</i>
<i>1. Aspek Fisiologis:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tonus jasmani</i> - <i>Mata dan telinga</i> 	<i>1. Lingkungan Sosial:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Keluarga</i> - <i>Guru dan staf</i> - <i>Masyarakat</i> - <i>Teman</i> 	<i>1. Pendekatan Tinggi:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Speculative</i> - <i>achieving</i>
<i>2. Aspek Psikologis:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Inteligensi</i> - <i>Sikap</i> - <i>Minat</i> 	<i>2. Lingkungan nonsosial:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Rumah</i> - <i>Sekolah</i> - <i>Peralatan</i> 	<i>2. Pendekatan Menengah:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Analitical</i> - <i>Deep</i>

⁸ *Ibid*, h 156.

<ul style="list-style-type: none"> - <i>Bakat</i> - <i>Motivasi</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Alam</i> 	<p>3. <i>Pendekatan Rendah :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Reproductive</i> - <i>Surface</i>
---	---	--

4. Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Uluran pemerintah di bidang pendidikan dimaksudkan untuk mengemban amanat konstitusi. Amanat tersebut, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, yang berbunyi antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumusan yang dihasilkan oleh para pendiri republik tersebut sangat dalam maknanya, tetapi dalam setiap periode mengalami berbagai interpretasi sesuai dengan perkembangan. Berkembangnya tujuan pendidikan dari GBHN satu ke GBHN berikutnya mengindikasikan bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar tersebut, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, haruslah dapat diinterpretasikan sesuai dengan kurun zamannya.

Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 disebutkan: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (ayat 1); Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang (ayat 2). Ayat pertama memberikan petunjuk kepada kita, bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan; sedangkan ayat kedua

memberikan petunjuk bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional⁹.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, ada banyak masalah yang segera harus dipecahkan. Masalah-masalah tersebut adalah sebagaimana dikemukakan berikut.

Ketidakseimbangan

Masalah kebijaksanaan pendidikan mendesak yang harus segera dipecahkan pertama-tama adalah terdapatnya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut meliputi, pertama, ketidakseimbangan mengenai jumlah penduduk yang berada pada usia sekolah dengan fasilitas yang tersedia untuk mereka. Masalah demikian, lebih terasa setelah animo masyarakat terhadap pendidikan semakin besar. Di tingkat sekolah dasar, persoalan demikian telah dirasakan terutama pada awal-awal repelita pertama; sedangkan pada repelita kelima dan keenam hampir-hampir persoalan ini telah dapat diselesaikan.

Sungguhpun demikian, persoalan ini kemudian beralih ke jenjang pendidikan di atasnya, ialah sekolah menengah pertama. Ini dirasakan terutama setelah terdapatnya amanat wajib belajar 9 tahun, bertambah tiga tahun dibandingkan periode-periode sebelumnya, yang 6 tahun. Penempatan sekolah menengah pertama dalam satu jajaran dengan sekolah dasar, yang menjelma menjadi pendidikan dasar, agaknya juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih tinggi kepada anggota masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik. Bagaimanapun, sedikit ataupun banyak,

⁹ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h 111.

peningkatan wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun, berkonsekuensi bagi penyediaan prasarana dan sarana, biaya dan tenaga pendidikan yang memadai.

Kedua, ketidakseimbangan pendidikan secara horizontal. Ketidakseimbangan ini bersentuhan dengan persoalan jenis dan jenjang pendidikan. Tingkat kemajuan yang dicapai di bidang pendidikan kejuruan dan teknik relatif kurang dibandingkan bidang pendidikan umum. Pada kurun repelita pertama, perbandingan murid sekolah umum dan kejuruan pada sekolah lanjutan pertama adalah 2:1. Perbandingan demikian, tampaknya juga berlanjut sampai dengan sekarang, oleh karena animo masyarakat terhadap sekolah-sekolah kejuruan memang umumnya kurang. Terbatasnya, prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh sekolah kejuruan, tampaknya juga turut memperkukuh ketidakseimbangan pendidikan kita secara horizontal.

Ketidakseimbangan secara horizontal ini juga ditunjukkan oleh kenyataan, bahwa arus mahasiswa non eksakta di tingkat pendidikan tinggi jauh melebihi arus mahasiswa dalam jurusan-jurusan yang lebih dibutuhkan seperti pertanian dan teknologi. Di kurun repelita pertama, perbandingan antara arus mahasiswa jurusan-jurusan sosial tersebut dibandingkan dengan eksakta dan teknik adalah 2:1. Ironisnya, rendahnya arus mahasiswa ke jurusan-jurusan eksakta dan teknik serta pertanian tersebut, justru pada saat-saat dunia ketenagakerjaan membutuhkan yang demikian. Sebagian besar rakyat kita hidup dari pertanian, sedangkan sebagian industri-industri besar yang ada di negeri ini banyak membutuhkan tenaga ahli di bidang teknik dan kejuruan.

Ketiga, ketidakseimbangan secara vertikal. Ketidakseimbangan secara vertikal menunjuk kepada perbandingan antara sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. Jumlah sekolah-sekolah dasar yang ada jauh lebih banyak, dan makin tinggi tingkatannya makin berkurang. Demikian, juga para siswa yang memasuki sekolah-sekolah tersebut, ada kecenderungan semakin tinggi jenjangnya, semakin terbatas siswa yang memasukinya. Pada kurun repelita pertama, terdapat 13 juta siswa SD, 1 juta siswa SLTP, 500.000 murid SLTA dan 230.000 mahasiswa.

Pada tahun 1987, lulusan sekolah di tingkat SD mencapai kurang lebih 35 juta anak, sedangkan pada sekolah menengah pertama sejumlah 8 juta anak yang lulus, sebagian dan tidak seluruhnya yang melanjutkan sekolah menengah atas. Sementara itu, di sekolah menengah atas sendiri, kurang lebih 500.000 anak merebutkan lebih kurang 80.000 kursi kuliah di perguruan tinggi negeri, dan hanya 15,47 % saja yang dapat diterima.

Pemerataan Pendidikan

Pemerataan atau kuantitas pendidikan berkenaan dengan seberapa banyak anak-anak yang berada pada usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan. Kuantitas pendidikan demikian pada kurun repelita pertama menjadi masalah utama, sedangkan pada kurun repelita keenam sudah hampir tidak menjadi masalah. Hanya saja, karena persoalan pemerataan ini mendapatkan makna baru, ialah sudah mengarah ke pemerataan layanan yang sama, maka ia pun kini tetap menjadi masalah.

Dalam pengertian yang baru, pengertian pemerataan sudah diintervensi oleh apa yang disebut sebagai keadilan di bidang pendidikan. Pemerataan yang adil di bidang pendidikan ini bisa berbeda maknanya dengan sekadar pemerataan yang dikemukakan pada periode 70-an. Dalam pemerataan jargon baru demikian, layanan pendidikan yang diberikan diupayakan sama tinggi atau tingkatannya, di samping sama kualitasnya. Kesempatan memperoleh pendidikan yang menurut jargon lama terbatas pada sama-samanya mendapatkan layanan pendidikan, tidak menjadi masalah apakah beragam ataukah tidak, sementara dalam pandangan baru demikian haruslah dirasakan adil oleh semua pihak.

Berkaitan dengan pemerataan yang sudah diintervensi oleh konsep keadilan ini, timbul masalah demikian : bagaimana pemerataan yang dapat dirasakan hasilnya oleh semua pihak tersebut? Pertanyaan demikian tidak mudah menjawabnya, oleh karena peserta didik sendiri, dan juga masyarakat berada dalam keragaman. Beragam kemampuannya, beragam minatnya, beragam kondisi fisik, ekonomi dan faktor-faktor individualitasnya. Dalam keberagaman demikian, tanpa ada rekayasa apa pun saja, masyarakat akan selalu menjadi beragam.

Di dunia pendidikan, masyarakat yang secara ekonomik mampu pasti akan beruntung dalam hal memilihkan pendidikan anaknya. Sebab, jika anak tersebut tidak diterima di sekolah atau perguruan tinggi negeri, umumnya dapat memilih perguruan tinggi swasta yang bermutu karena dapat dukungan faktor-faktor ekonomi. Tidak itu saja, mereka masih juga mengambil alternatif yang baik semisal menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Demikian juga anak-anak yang

fisiknya kuat, yang mempunyai bakat khusus dan yang mempunyai intelegensi tinggi, umumnya lebih beruntung ketimbang anak yang tidak demikian.

Kualitas pendidikan

Masalah kualitas pendidikan berkenaan dengan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar bangsa Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya. Dalam masalah ini tercakup pula masalah ketertinggalan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang lebih maju. Masalah kualitas pendidikan menyangkut banyak hal, antara lain kualitas calon anak didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya, prasarana dan sarana pendidikan.

Di tingkat operasional, masalah kualitatif pendidikan demikian berkenaan dengan masalah kualitas mengajar guru dan kualitas belajar siswa. Kedua-duanya, baik kualitas mengajar guru maupun belajar siswa, haruslah sama-sama ditingkatkan secara serempak agar didapatkan kualitas lulusan sebagaimana yang dikehendaki.

Persoalan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan ini adalah kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di sekolah-sekolah lanjutan umum yang memiliki kecakapan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Metode mengajar yang konvensional dan cara evaluasi yang lazim terkonsentrasi pada aspek pengetahuan dan ingatan dan sekadar mempersiapkan ujian menjadikan penyebab belajar siswa sekadar ditujukan untuk ujian belaka. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijaksanaan yang aksentuasinya pada

peningkatan mutu pendidikan ini. Sebagai sumber penyebab masalah lain berkaitan dengan kualitas ini adalah tersedianya guru yang tidak sesuai dengan bidangnya. Usaha-usaha yang mengarah agar guru sekadar mengajarkan apa yang menjadi keahlian mereka dan tidak mengajarkan apa yang di luar keahliannya tampaknya belum dapat dituntaskan oleh sistem pendidikan kita.

Relevansi pendidikan

Masalah relevansi pendidikan adalah masalah yang timbul berkaitan dengan hubungan antara sistem pendidikan dan pembangunan nasional serta kepentingan perseorangan, keluarga dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ini meminta adanya keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional agar pendidikan merupakan wahana penunjang yang efektif bagi proses pembangunan dan ketahanan nasional. Masalah ini menyangkut masalah pokok dalam pembangunan nasional seperti masalah tata nilai, industrialisasi, pembangunan pertanian, perencanaan tenaga kerja, pertumbuhan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

Secara mikro, masalah relevansi demikian menyangkut relevansi pendidikan anak dengan lingkungan anak baik fisik maupun sosial, relevansi antara pendidikan dengan tuntutan kehidupannya baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang dan relevansi pendidikan anak dengan kebutuhan ketenagakerjaan dan pembangunan nasional.

Masalah relevansi demikian seringkali menjadi bahan perdebatan, oleh karena hampir keseluruhan suprasistem pendidikan memberikan tuntutan terhadap

dunia pendidikan. Jika supra sistem pendidikan bermacam-macam, berjenis-jenis atau banyak sekali ragamnya, maka sebanyak itu pula tuntutan dunia luar pendidikan terhadap dunia pendidikan. Sangatlah mustahil jika hal demikian dapat dilakukan oleh dunia pendidikan terkecuali diadakan pembagian tugas dan peranan antar jenis pendidikan itu dalam melayani kebutuhan dan tuntutan suprasistemnya.

Efektivitas Pendidikan

Masalah efektivitas adalah masalah yang menyangkut kemampuan pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Kemampuan sistem sendiri, bersentuhan dengan kurikulum secara konseptual dan kurikulum secara praktikal. Sementara kurikulum secara praktikal tersebut, bersentuhan dengan kemampuan guru untuk menjabarkan dan menyampaikan kepada para peserta didiknya.

Efektivitas pendidikan ini menyangkut efektivitas belajar siswa dan efektivitas mengajar guru. Efektivitas belajar siswa berarti bahwa apa yang dipelajari oleh siswa dapat menimbulkan penguasaan yang tinggi atas bahan-bahan ajaran di samping tinggi tingkat retensinya. Sementara efektivitas mengajar guru, oleh karena sasaran pendidikan utamanya tertuju kepada siswa, maka dapat dilihat dari segi seberapa penguasaan siswa atas bahan ajaran disamping seberapa kemampuan siswa untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya.

Dalam pengajaran yang efektif, guru dapat mengajar bagaimana seharusnya siswa belajar, dan menginternalisasikan nilai-nilai agar siswa mau belajar terus-menerus sepanjang hayat. Kesadaran belajar sepanjang hayat demikian sangat diperlukan, mengingat perkembangan dan tuntutan dunia yang berkembang melesat seperti sekarang ini, hanya dapat diikuti oleh orang yang sepanjang waktu mau belajar.

Efisiensi Pendidikan

Masalah efisiensi berkenaan dengan seberapa sumber-sumber potensial pendidikan, baik yang bersifat manusiawi maupun non manusiawi yang sangat terbatas, dapat dioptimalkan penggunaannya. Prinsip efisiensi senantiasa menekankan, agar dengan sedikit tenaga, biaya dan penggunaan sumber-sumber potensial pendidikan, bias didapatkan hasil yang maksimal.

Prasyarat bagi adanya efisiensi ini adalah terdapatnya sistem kendali yang baik. Perlu adanya pengawasan yang baik dan dilakukan secara terus-menerus, agar dapat ditekan seminimal mungkin mengenai kebocoran, pemborosan dan penyalahgunaan dalam penggunaan sumber-sumber daya pendidikan.

B. Wajib Belajar 9 Tahun

1. Pengertian Wajib Belajar 9 Tahun

Pengertian wajib belajar sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pada Bab I pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. Dan pada ayat 2 disebutkan: “Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.”

2. Sejarah Wajib Belajar 9 Tahun

Program pendidikan wajib belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Dalam UU nomor 4 tahun 1950 jo UU nomor 12 tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahun terkena pendidikan wajib belajar. Namun program pendidikan wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya pergolakan politik secara terus-menerus.

Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi Presiden Suharto mencanangkan pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar. Pada tahap ini penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Berbeda dengan pendidikan wajib belajar tahun 1950,

maka pendidikan wajib belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada anak-anak usia 7-12 tahun.

Dua kenyataan mendorong segera dilaksanakannya gerakan pendidikan wajib belajar tersebut. Kenyataan pertama, ialah masih adanya anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat sekolah dasar. Pada tahun 1983 terdapat sekitar 2 juta anak usia 7-12 tahun yang terlantar dan putus sekolah pada tingkat sekolah dasar. Sedangkan pada saat dicanangkannya pendidikan wajib belajar pada tahun 1984 masih terdapat anak berusia 7-12 tahun sekitar kurang lebih 1,5 juta orang yang belum bersekolah. Kenyataan kedua, ialah adanya keinginan pemerintah untuk memenuhi ketetapan GBHN yang telah mencantumkan rencana penyelenggaraan pendidikan wajib belajar sejak GBHN 1978 maupun GBHN 1983. Gerakan pendidikan wajib belajar dimulai 2 Mei 1984 dipandang sebagai pemenuhan janji pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara cukup dan memadai, sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945 segera dapat diwujudkan.

Peningkatan pendidikan wajib belajar menjadi pendidikan wajib belajar 9 tahun dengan harapan terwujud pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terkecil. Hal ini sesuai dengan UU No:2 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI No: 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang pada pasal 34 yang berbunyi :

- a. Setiap warga negara berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- c. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan.

3. Fungsi dan Tujuan Wajib Belajar 9 Tahun

Fungsi wajib belajar sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada Bab II pasal 2 ayat 1 berbunyi: “Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara Indonesia.”

Jika perluasan dan mutu pendidikan dilakukan dalam kerangka keterkaitan maka pendidikan dasar 9 tahun langsung berfungsi sebagai strategi dasar dalam upaya:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa dan status sosial ekonomi.
- b. Menyiapkan tenaga kerja industri masa depan melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan dasar belajar, serta dapat menunjang terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan professional lebih lanjut.

- c. Membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini memungkinkan untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam sebuah makalah yang diterbitkan oleh Muhammad Ilyas Ismail, yang berjudul “Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” pada bulan November 2009 mengatakan bahwa: “Program pendidikan wajib belajar 9 tahun pada hakekatnya berfungsi memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Sedangkan tujuan wajib belajar sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun pada Bab II pasal 2 ayat 2 berbunyi: “Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.”

Dalam sebuah makalah yang ditulis oleh Soegimin Gitoasmoro yang berjudul: “Peran Pendidikan Non Formal dalam Realisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar” tahun 2005 menyatakan bahwa tujuan wajib belajar 9 tahun adalah:

- a. Tujuan jangka pendek: secara bertahap melakukan pendataan, pemetaan, penentuan pola wajib belajar, perencanaan ketentuan fasilitas dan perintisan implementasi menuju persiapan wajib belajar pendidikan menengah.
- b. Tujuan jangka menengah: menciptakan kondisi nasional melalui wajib belajar pendidikan dasar untuk dapat ditingkatkan ke wajib belajar yang lebih tinggi.
- c. Tujuan jangka panjang: menciptakan kondisi nasional agar seluruh warga negara Indonesia yang berusia 13-15 tahun dan telah tamat SD atau yang sederajat berkesempatan mengikuti pendidikan SLTP atau sederajat sampai tamat.

Sedangkan Hadari Nawawi menyebutkan tujuan pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

4. Pendekatan Wajib Belajar 9 Tahun

Strategi pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia, saat ini dilaksanakan dengan menerapkan beberapa pendekatan, meliputi: pendekatan budaya, pendekatan social, pendekatan agama, pendekatan borikrasi, pendekatan hukum, serta pendekatan konteks.

a) Pendekatan Budaya

Sosialisasi wajib belajar dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah tersebut; misalnya daerah yang masyarakatnya senang dengan seni, maka pesan-pesan wajib belajar dapat disisipkan pada gelar seni. Masyarakat yang sangat menghormati adat, maka tokoh adat dilibatkan dalam pemikiran dan pelaksanaan sosialisasi Wajar Dikdas Sembilan tahun yang bermutu. Sanksi adat biasanya lebih disegani daripada sanksi hukum.

b) Pendekatan Sosial

Sosialisasi Wajar Dikdas Sembilan tahun yang bermutu perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bila dalam masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi. Tokoh masyarakat ini bisa berasal dari tokoh formal, maupun tokoh non formal. Pada masyarakat ekonomi lemah, sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang pelayanan pemerintah untuk pendidikan, misalnya BOS maupun beasiswa. Bila anak sibuk membantu kerja orangtua, anak tidak harus berhenti bekerja, tetapi disampaikan jenis pendidikan alternatif yang bisa diikuti oleh anak bersangkutan, misalnya SMP Terbuka atau program Paket B.

c) Pendekatan Agama

Pada daerah tertentu ada yang masyarakatnya sangat agamais dan sangat mentaati ayat-ayat suci. Untuk daerah seperti ini peran para tokoh agama sangat sesuai. Dengan mengutip ayat-ayat suci, maka konsep wajib belajar lebih mudah diikuti. Untuk ini motto “belajar adalah ibadah” yang didasarkan

atas kajian yang sangat mendalam oleh para tokoh agama dapat diangkat menjadi motto dalam sosialisasi Wajib Dikdas Sembilan tahun yang bermutu.

d) Pendekatan Birokrasi

Pendekatan birokrasi ialah upaya memanfaatkan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan merupakan salah satu bentuk pendekatan birokrasi. Birokrasi ditempuh karena dengan pendekatan ini lebih mudah diperoleh berbagai faktor penunjang baik tenaga, sarana maupun dana. Namun demikian pendekatan ini akan lebih berhasil bila digabungkan dengan pendekatan yang lain.

e) Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum ialah pendekatan yang hanya digunakan untuk daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan sangat rendah dan tingkat resistensinya tinggi. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun sampai saat ini masih memberlakukan konsep “*universal basic education*” dan belum menerapkan konsep “*compulsary education*”.

5. Peranan Orang Tua terhadap Wajib Belajar

Dalam GBHN (ketetapan MPR No. IV/MPR/1978), berkenaan dengan pendidikan dikemukakan antara lain sebagai berikut : “pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan

masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah”.

Tanggung jawab pendidikan diselenggarakan dengan kewajiban mendidik. Secara umum mendidik ialah membantu anak didik di dalam perkembangan dari daya-dayanya dan di dalam penetapan nilai-nilai. Bantuan atau bimbingan itu dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik dalam situasi pendidikan yang terdapat dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat.

Bimbingan itu adalah aktif dan pasif. Dikatakan “pasif”, artinya si pendidik tidak mendahului “masa peka” akan tetapi menunggu dengan seksama dan sabar.

Bimbingan aktif terletak di dalam :

- a) Pengembangan daya-daya yang sedang mengalami masa pekanya;
- b) Pemberian pengetahuan dan kecakapan yang penting untuk masa depan si anak; dan
- c) Membangkitkan motif-motif yang dapat menggerakkan si anak untuk berbuat sesuai dengan tujuan hidupnya.

Pemberian bimbingan ini dilakukan oleh orang tua di dalam lingkungan rumah tangga. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama anak dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.


Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati Suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang ada di sampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai ibunya dan biasanya, seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak, yang mula-mula menjadi temannya dan yang mula-mula dipercayainya. Apapun yang dilakukan ibu dapat dimaafkannya, kecuali apabila ia ditinggalkan. Dengan memahami segala sesuatu yang terkandung di dalam hati anaknya, juga jika anak telah mulai agak besar, disertai kasih sayang, dapatlah ibu mengambil hati anaknya untuk selama-lamanya.

Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. Di mata anaknya ia seorang yang tertinggi gengsinya dan terpandai di antara orang-orang yang dikenalnya. Cara ayah itu melakukan pekerjaannya sehari-hari berpengaruh pada cara pekerjaan anaknya. Ayah merupakan penolong utama, lebih-lebih bagi anak yang agak besar, baik laki-laki maupun perempuan, bila ia mau mendekati dan dapat memahami hati anaknya.

Pada dasarnya kenyataan-kenyataan yang dikemukakan diatas itu berlaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga dengan bagaimanapun juga keadaannya. Hal itu menunjukkan ciri-ciri dari watak rasa tanggung jawab setiap orang tua atas kehidupan anak-anak mereka untuk masa kini dan mendatang. Bahkan para orang tua umumnya merasa bertanggung jawab atas segalanya dari kelangsungan hidup anak-anak mereka. Karenanya tidaklah diragukan bahwa tanggung jawab pendidikan secara mendasar terpikul kepada orang tua. Apakah tanggung jawab pendidikan itu diakuinya secara sadar atau tidak, diterima dengan sepenuh hatinya atau tidak, hal itu adalah merupakan “fitrah” yang telah dikodratkan Allah SWT kepada setiap orang tua. Mereka tidak bisa mengelakkan tanggung jawab itu karena telah merupakan amanat Allah SWT yang dibebankan kepada mereka.

Disamping itu pangkal ketenteraman dan kedamaian hidup terletak dalam keluarga. Mengingat pentingnya hidup keluarga yang demikian, maka Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup yang terkecil saja, melainkan lebih dari itu, yakni sebagai lembaga hidup manusia yang memberi peluang kepada para anggotanya untuk hidup celaka atau bahagia dunia dan akhirat. Pertama-tama yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam mengembangkan agama Islam adalah untuk mengajarkan agama itu kepada keluarganya, baru kemudian kepada masyarakat luas. Hal itu berarti di dalamnya terkandung makna bahwa keselamatan keluarga harus lebih dahulu mendapat perhatian atau harus didahulukan ketimbang keselamatan masyarakat. Kerena keselamatan masyarakat pada hakikatnya bertumpu pada keselamatan keluarga.




“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” (QS.

Demikian pula Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarganya serta berkewajiban untuk memelihara keluarganya dari api neraka, sebagaimana Firman Allah :

[illegible]

*“hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
ka. . .”* (QS. At-Tahrim 6).

75

Artinya :

“ Anas mengatakan bahwa Rasulullah bersabda : Anak itu pada hari ke tujuh dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi namanya dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia didik beradap susila, jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika telah berumur 13 tahun dipukul agar mau sembayang (diharuskan). Bila ia telah berumur 16 tahun boleh dikawinkan, setelah itu ayah berjabat tangan dengannya dan mengatakan : “Saya telah mendidik, mengajar, dan mengawinkan kamu, saya mohon perlindungan kepada Allah dari fitnahan-fitnahan di dunia dan siksaan akhirat”

Dilihat dari hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, maka tanggung jawab pendidikan itu dasarnya tidak bisa dipikul kepada orang lain, sebab guru dan pemimpin umat umpamanya, dalam memikul tanggung jawab pendidikan hanyalah merupakan keikutsertaan. Dengan kata lain, tanggung jawab pendidik yang dipikul oleh para pendidik selain orang tua adalah merupakan pelimpahan dari tanggung jawab orang tua yang karena satu dan lain hal tidak mungkin dilaksanakan pendidikan anaknya secara sempurna.

Tanggung jawab pendidikan Islam yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka :

- 1) Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.

- 2) Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit dan penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafat hidup dan agama yang dianutnya.
- 3) Memberikan pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya.
- 4) Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.

Melihat lingkup tanggung jawab pendidikan Islam yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat dalam arti yang luas dapatlah diperkirakan bahwa para orang tua tidak mungkin dapat memikulnya sendirian secara “sempurna”, lebih-lebih dalam masyarakat yang sentiasa berkembang maju. Hal ini bukanlah merupakan “aib” karena tanggung jawab tersebut tidaklah harus sepenuhnya dipikul oleh orang tua secara sendiri-sendiri, sebab mereka, sebagai manusia mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Namun demikian patuhlah diingat bahwa setiap orang tua tidak dapat mengelakkan tanggung jawab itu. Artinya, pada akhirnya, betapun juga, tanggung jawab pendidikan itu berada dan kembali atau terpulang kepada orang tua juga.

Kenyataan hidup telah membuka peluang kepada orang-orang lain (pendidik selain orang tua) untuk turut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Peluang itu dasarnya terletak pada kemungkinan apakah orang-orang lain itu dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai seperti yang diharapkan oleh orang tua. Dengan demikian peluang ini hanya mungkin diisi oleh setiap orang

dewasa yang mempunyai harapan, cita-cita, pandangan hidup dan hidup keagamaan yang sesuai dengan apa yang dihayati oleh orang tua untuk anak-anaknya. Di samping itu, tentu saja kesediaan orang dewasa yang demikian itu diperlukan karena dengan itu ia menyatakan kerelaannya untuk memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang dibebankan kepada orang tua.

6. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan dibuat dan diimplementasikan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Oleh karena masalah-masalah rakyat yang bermaksud dipecahkan, maka dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dan partisipasi rakyat. Pada bagian ini akan dibahas: alasan-alasan perlunya partisipasi masyarakat, batasan partisipasi masyarakat, upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan.

a. Alasan-Alasan Perlunya Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, diyakini bahwa pemerintahan dibuat, oleh dan untuk rakyat. Kebijakan-kebijaksanaan negaranya, termasuk kebijaksanaan pendidikannya, sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan di negara tersebut, juga berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan/bukanlah jargon baru lagi. Ia adalah satu keniscayaan¹⁰.

¹⁰ Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Proses Produk dan Masa Depan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h 79.

Selain alasan demokrasi, kebijaksanaan pendidikan tersebut secara kongkrit dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat di bidang pendidikan. Rakyat lebih banyak tahu mengenai masalah mereka sendiri, dan bahkan juga banyak mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Maka, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, justru memperkuat pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana formal.

Pembangunan yang dilakukan oleh negara termasuk salah satu wujud dari implementasi kebijaksanaan yang diformulasikan. Yang dibangun tersebut, tidak hanya masalah fisik dan mental, melainkan juga sekaligus pembangunan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, dengan demikian termasuk bagian atau objek dari pembangunan itu sendiri.

Masyarakat juga dipandang sebagai modal dasar pembangunan, yang jika digalakkan akan besar sumbangannya terhadap pembangunan yang digalakkan. Keterlibatan mereka dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara, termasuk kebijaksanaan pendidikannya, adalah manifestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal dasar pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan, tidak saja sekadar dipandang sebagai loyalitas rakyat atas pemerintahannya, melainkan yang juga tak kalah penting adalah bahwa kebijaksanaan tersebut hendaknya dianggap oleh masyarakat sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan, masyarakat akan semakin banyak sumbangannya

dalam pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikannya.

b. Batasan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah suatu term yang menunjuk kepada adanya keikutsertaan secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan¹¹.

Dalam sistem pemerintahan yang *top down* partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijaksanaan yang dibuat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan; tetapi pada sistem pemerintahan yang *bottom up*, tingginya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan, dapat dijadikan sebagai indikasi sukses tidaknya kebijakan.

Muhadjir menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tipologinya, ialah partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk kepada frekuensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijakan, sementara partisipasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya.

Koentjoroningrat menggolongkan partisipasi masyarakat berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya. Pertama, partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus; kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktivitas bersama pembangunan.

¹¹ *Ibid*, h 80.

Miftah Thoha menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tiga golongan, yaitu: (1) partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, (2) partisipasi mobilisasi, (3) partisipasi seremoni.

Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari cakupannya, yaitu partisipasi secara sempit, partisipasi secara luas, dan partisipasi yang merupakan lawan dari kegiatan politik. Secara luas, partisipasi dapat diartikan sebagai demokratisasi politik: masyarakat yang menentukan tujuan, strategi dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijaksanaan atau pembangunan. Secara sempit, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan sendiri. Sebagai lawan dari kegiatan politik, partisipasi dapat diartikan sebagai: golongan-golongan masyarakat yang berbeda-beda kepentingannya dididik mengajukan secara rasional keinginannya dan menerima sukarela keputusan pembangunan.

c. Upaya-Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Setiap kebijakan pendidikan yang digulirkan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan, umumnya mendapat respons dari masyarakat. Meskipun mungkin suatu kebijakan tidak didukung oleh sebagian masyarakat, tetapi haruslah disadari bahwa sebagian masyarakat yang lainnya pasti ada yang mendukung. Heterogenitas masyarakat memungkinkan hal tersebut. Pasti ada di antara lapisan masyarakat yang mau berpartisipasi dalam kebijakan yang dibuat, seberapa pun partisipasinya dan sekadar apa pun partisipasinya. Meskipun

mungkin pembuat dan pelaksana kebijaksanaan tersebut tidak mengupayakan sama sekali partisipasi masyarakat.

Sungguhpun demikian, pembuat dan pelaksana kebijaksanaan haruslah senantiasa berusaha agar kebijaksanaan yang digulirkan tadi, melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat, terutama dalam hal pelaksanaannya. Inilah perlunya upaya dan rekayasa¹².

Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menawarkan sanksi atas masyarakat yang tidak mau berpartisipasi. Sanksi demikian, dapat berupa penghukuman, denda, dan kerugian-kerugian yang harus diderita oleh si pelanggar.
2. Menawarkan hadiah kepada mereka yang mau berpartisipasi. Tentu hadiah demikian, berdasarkan kuantitas dan tingkatan atau derajat partisipasinya.
3. Melakukan persuasi kepada masyarakat, bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam kebijaksanaan yang dilaksanakan, justru akan menguntungkan masyarakat sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan.
5. Mengaitkan partisipasi masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik.
6. Menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijaksanaan, agar masyarakat kebanyakan

¹² *Ibid*, h 82.

yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijaksanaan yang diimplementasikan.

7. Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan dengan kepentingan mereka. Masyarakat memang perlu diyakinkan, bahwa ada banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik, jika mereka berpartisipasi dalam kebijaksanaan.
8. Menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara sah. Dan, kebijaksanaan yang sah tersebut, adalah salah satu dari wujud pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat.

Ada beberapa penyebab mengapa masyarakat enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam kebijaksanaan yang digulirkan. Penyebab-penyebab tersebut adalah:

1. Jika kebijaksanaan tersebut bertentangan dengan tata nilai dan tata norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
2. Kurang mengikatnya kebijaksanaan tersebut kepada masyarakat. Ada kebijaksanaan yang sangat mengikat kepada masyarakat dan ada yang tidak begitu mengikat. Kebijaksanaan yang sangat mengikat umumnya memberlakukan sanksi yang jelas bahkan bisa menjadi penyebab yang menerima sanksi dianggap mempunyai cacat sosial; sedangkan kebijaksanaan yang tidak demikian mengikat umumnya tidak demikian dipatuhi dan tidak menjadikan penyebab cacat sosial bagi pelanggarnya.
3. Adanya ketidakpastian hukum baik bagi mereka yang berpartisipasi aktif maupun bagi mereka yang tidak berpartisipasi.

4. Jika kebijaksanaan tersebut terlalu ambisius dan ideal, sehingga oleh masyarakat dianggap tidak realistis. Hal demikian, bisa menjadi penyebab masyarakat enggan berpartisipasi, karena mereka tidak yakin bahwa partisipasi mereka akan membawa hasil.
5. Adanya anggota masyarakat yang memang sengaja tidak berpartisipasi disebabkan alasan-alasan untuk mencari untung secara tepat. Padahal, keuntungan tersebut baru didapat, jika ia melanggar ketentuan yang berlaku dalam kebijaksanaan. Anggota masyarakat demikian cenderung tidak mau berpartisipasi dalam kebijaksanaan yang digulirkan.
6. Rumusan kebijaksanaan tidak jelas dan mungkin antara rumusan satunya dengan yang lain kelihatan bertentangan. Ini menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi, lebih-lebih partisipasi aktif yang dilandasi oleh kesadaran yang dalam.

C. Telaah Kajian Terdahulu

dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Alwen Bentri, Anas Yasin, Afrizal Sano, Herman Nirwana, Mujiran dan Marjohan (Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang), pada bulan Desember 2007 yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Sumatera Barat, penelitian ini dilatar belakangi oleh ingin mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun di Sumatera Barat. Pada penelitian ini dipusatkan dalam masalah :

1. Berapa jumlah anak usia 7-15 tahun serta Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).
2. Berapa jumlah lulusan SD/MI dan SMP/MTs serta jumlah sebaran anak putus sekolah pada usia 7-15 tahun.
3. Faktor internal dan eksternal anak-anak yang putus sekolah.
4. Upaya yang dilakukan pemerintah, sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.
5. Rekomendasi tentang pola pelaksanaan wajib belajar 9 tahun agar mencapai sasaran yang diinginkan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif jenis survei. Adapun subjek yang diteliti adalah semua anak yang mengikuti wajib belajar 9 tahun dan mereka yang lulus dan putus sekolah, faktor internal dan eksternal yang menyebabkan anak putus sekolah, upaya yang dilakukan pemerintah, sekolah dan masyarakat serta pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

Populasi penelitian ini meliputi jumlah anak SD/MI dan SMP/MTs (Negeri/Swasta), orang tua siswa, pemerintah terkait dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Sumatera Barat.

Karena jumlah populasi sangat besar maka perlu dilakukan pengambilan sampel dengan teknik multi stage.

Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa jumlah anak usia 7-12 tahun pada tahun 2004/2005 adalah 630.659 orang dan tahun 2005/2006 sebanyak 643.296 orang. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada tahun 2004/2005 adalah 271.466 orang dan pada tahun 2005/2006 adalah 278.951 orang. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI yang diperoleh pada tahun 2004/2005 adalah 109,37 % dan tahun 2004/20065 adalah 112,46 % sedangkan APK SMP/MTs pada tahun 2004/2005 adalah 87,32 % dan tahun 2005/2006 sebanyak 87,61 % dan jumlah tersebut terlihat bahwa ada peningkatan, yang disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk secara keseluruhan dan meningkatnya daya tampung sekolah untuk usia 7-15 tahun serta dibarengi oleh meningkatnya partisipasi anak, orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan.

Dari partisipasi ini dapat diperoleh bahwa kebijakan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Sumatera Barat telah berhasil walaupun secara kuantitatif belum signifikan.

Kesimpulan dan saran-saran penelitian ini adalah :

1. Meningkatnya jumlah anak usia 7-15 tahun sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dan mengisyaratkan bahwa meningkatnya kesadaran untuk berpartisipasi mengikuti pendidikan khususnya usia 7-15 tahun.
2. Faktor yang dominan menyebabkan anak putus sekolah adalah faktor eksternal yakni kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah terus melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dan terus mengupayakan sekolah gratis bagi anak yang kurang mampu.

Dalam penelitian ini menyarankan agar :

1. Pemerintah perlu melanjutkan program bantuan bagi sekolah dalam meningkatkan beban biaya pendidikan khususnya bagi orang tua yang tidak mampu.
2. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui Dinas Pendidikan perlu sekali memutakhirkan data tentang jumlah orang tua yang kurang mampu yang menyebabkan anak putus sekolah. Dengan data yang mutakhir dan benar, pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat/orang tua yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan biaya pendidikan.

Pada sebuah tesis yang ditulis oleh Amir Hansyah yang berjudul Implementasi Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibimbing oleh Drs. Soetomo, M.Si tahun 2007. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Pangkalan Banteng belum optimal. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan di SMP. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Pendidikan ataupun Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkalan Banteng telah berupaya melaksanakan wajib belajar 9 tahun. Permasalahan

program wajib belajar 9 tahun, baik yang bersifat positif (dukungan) maupun yang bersifat negatif (hambatan). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif diskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik interaktif models. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Pangkalan Banteng dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mendukung adalah adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berupa pembebasan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, dan dukungan sarana pendidikan dan dukungan keuangan dari pemerintah pusat. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yaitu beban dan daya tampung wajib belajar, prasarana dan sarana, masalah kualitas, masalah guru, masalah pendanaan, lokasi geografis, dampak kebijakan ujian nasional. Kesimpulannya: faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin yaitu : (1) Kebijakan sekolah gratis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, terutama bagi masyarakat kurang mampu kebijakan ini perlu diteruskan untuk mengantisipasi bertambahnya anak usia sekolah dari golongan masyarakat tidak mampu. Bantuan pendanaan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) untuk SD dan SMP se-Kecamatan Pangkalan Banteng, (2) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya wajib belajar 9 tahun adalah : beban dan daya tampung akibat pertambahan jumlah penduduk, kondisi prasarana dan sarana yang kurang memadai, termasuk tidak

dilaksanakannya Program Kejar Paket A (Setara SD) dan Kejar Paket B (Setara SMP), kualifikasi guru yang belum ideal, lokasi geografis yang terpencil tidak mempunyai cukup guru, pendanaan yang masih kurang, dampak pelaksanaan ujian nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian berdasarkan tempat penelitian, penelitian dibedakan atas tiga jenis, yaitu¹:

1. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang berlangsung dilakukan dilapangan atau pada responden.
2. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku cetak maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu.
3. Penelitian laboratorium (laboratory research), yaitu penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu (laboratorium) dan biasanya tempat eksperimen atau percobaan.

Dari keterangan diatas sejalan dengan penelitian yang penulis laksanakan untuk menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis menentukan bentuk/jenis penelitian lapangan, yakni penelitian yang langsung dilaksanakan dilapangan atau pada responden.

¹ Iqbal Hasan, *Analisa Data dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h 5.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian sebaiknya sudah dilakukan sejak awal, dasar penelitiannya harus disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penentuan lokasi yang tepat akan sangat membantu bagi peneliti untuk memusatkan perhatian.

Dari keterangan diatas untuk menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, penulis menetapkan lokasi penelitian adalah di :

- a. Desa Nusantara Jaya Kecamatan keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Kantor Camat Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan dasar pertimbangan masalah biaya, waktu, dan karakteristik daerah tersebut.

Tiga lokasi ini menurut penulis telah cukup untuk meneliti pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis gunakan untuk menyelesaikan penelitian tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah mulai 01 Januari 2011 sampai dengan 30 April 2011.

C. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

- a. Semua masyarakat usia 7-15 tahun berjumlah 11.534 orang
- b. Semua orang tua anak usia 7-15 tahun berjumlah 3.867 orang
- c. Guru SD/MI dan SMP/MTS yang berjumlah 720 orang
- d. Pemerintah terkait dalam hal pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 40 orang

Jadi jumlah subjek penelitian adalah 16.153 orang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

D. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Menurut Dr. Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Jadi populasi bisa terdiri atas orang dan dapat pula berupa objek tertentu seperti luas dan jenis tanah, karyawan perusahaan dan sebagainya².

Populasi bisa terbatas dan bisa tidak terbatas, populasi yang terbatas adalah populasi yang dapat dihitung jumlahnya, adapun populasi yang tidak terbatas sulit untuk dihitung jumlahnya. Dalam menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir penulis membatasi populasi hanya pada :

- a. Semua anak usia 7-15 tahun berjumlah 11.534 orang.
- b. Semua orang tua anak 7-15 tahun berjumlah 3.867 orang.
- c. Semua guru yang mengajar di SD/MI dan SMP/MTS di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 720 orang.
- d. Pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun berjumlah 40 orang.

2. Sampel

Sampel adalah kajian suatu objek atau subjek yang mewakili populasi, pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik populasi akan menyebabkan suatu penelitian menjadi bias tidak dapat di percaya dan kesimpulannya pun bisa keliru dikarenakan sampel tidak dapat mewakili populasi.

² Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h 33.

Berhubung jumlah populasi sangat besar, maka perlu dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik multistage. Sampel diambil dengan teknik stratified proportional sample pada tahap awal dan proportional cluster sampling pada tahap berikutnya.

- a. Stratified, dari populasi diambil secara bertingkat, Kecamatan ke Desa dan ke SD/MI dan SMP/MTs yang ada di desa tersebut.
- b. Dari Kecamatan Keritang akan diambil 2 desa, untuk pengambilan 2 desa tersebut di pakai kriteria tingkat kondisi siswa SD/MI dan SMP/MTs yang putus sekolah tinggi dan rendah.
- c. Dengan cara demikian akan diperoleh sampel dengan 2 desa dengan tingkat putus sekolah yang tinggi dan rendah, dari tiap desa akan diambil satu SD, satu SMP, satu MI dan satu MTs negeri/swasta dengan kriteria tingkat.

Besarnya jumlah sampel yang akan diambil tergantung dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian tidak semua anggota populasi yang diteliti. Hal ini mengingat keterbatasan jumlah tenaga, biaya, dan waktu. Untuk itulah diperoleh sampel yang akan mewakili suatu populasi. Rumus penetapan sampel menurut Solfin adalah:

$$n = \frac{N}{N + (d)^2 H}$$

n= sampel

N= populasi

D= Nilai presisi 95% atau $\alpha = 0,05$

Dari populasi yang berjumlah 16153 sampel yang penulis tetapkan adalah berjumlah 134 orang yang terbagi dalam empat karakteristik.

E. SUMBER DATA

Sumber data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder³.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data langsung dari personil tergantung dari objek mana yang diteliti untuk menjelaskan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berasal dari anak usia 7-15 tahun, orang tua anak 7-15 tahun, guru dan pemerintah terkait dengan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan oleh orang lain atau instansi di luar dari peneliti sendiri walaupun yang dikumpulkan itu data asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lain yang ada kaitannya dengan pemerintah ini.

³ *Ibid*, h 57.

F. METODE/TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode/teknik pengumpulan data dengan masalah dan tujuan penelitian. Secara umum metode/teknik pengumpulan data dapat dibagi kedalam empat bagian yaitu:

1. Angket

Menurut Hudri Nawawi, angket (kuesioner), adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Pertanyaan yang diajukan dalam angket sebaiknya mengarah kepada permasalahan, tujuan dan hipotesis penelitian. Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimuat dalam angket. Mereka diharapkan mengetahui dirinya sendiri, mampu dan bersedia memberikan uraian serta dapat ditafsirkan pertanyaan yang dibuat oleh peneliti⁴.

Menurut Wikarno Surachman angket bersifat kooperatif dalam arti di responden diharapkan bekerja sama dalam menyisihkan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti secara tertulis sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan.

Berdasarkan bentuk pertanyaan, angket dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Angket tertutup

⁴ *Ibid* , 60.

Angket tertutup adalah suatu angket dimana pertanyaan dan alternatif jawabannya telah ditentukan di sehingga responden tinggal menulis jawaban yang ditentukan penulis.

b. Angket terbuka

Angket terbuka adalah angket dimana responden masih diberi kesempatan secara bebas memberikan jawaban sesuai dengan pendapat sendiri, jawaban responden dapat berupa uraian panjang lebar sesuai dengan kehendaknya.

c. Kombinasi angket tertutup dan terbuka

Pertanyaan pada angket ini disamping diberi alternatif jawaban oleh peneliti, juga masih memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban lain apabila dianggap perlu.

Dari keterangan di atas untuk menyelesaikan permasalahan tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir penulis menggunakan bentuk angket tertutup dimana pertanyaan dan alternatif jawaban telah ditentukan sehingga responden tinggal menulis jawaban yang ditentukan penulis.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

Berdasarkan cara pendekatannya observasi dibagi dua, yaitu: observasi langsung dan observasi tidak langsung.

- a. Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada pada objek yang diteliti.
- b. Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat peristiwa yang akan diteliti.

Pengamatan seperti ini dilakukan melalui film, foto, slide, pencatatan suatu alat perekam, dan sebagainya.

3. Wawancara

Menurut Prof. Dr. S. Nasution wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian.

Dalam wawancara selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan. Pihak yang satu berkedudukan sebagai peminta informasi dan pihak yang berlainannya sebagai pemberi informasi. Pewawancara mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan dan mencatat jawaban dari responden, di pihak lain orang yang diwawancarai memberikan beberapa penjelasan dalam melakukan wawancara pengetahuan, keterampilan,

dan kemampuan berpikir serta kemampuan untuk menilai kesesuaian antara jawaban dengan jawaban lainnya. Wawancara yang dilakukan peneliti jangan sampai terputus atau mengandung kecurigaan terhadap responden.

4. Dokumentasi/Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepuustakaan) atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian, data ini biasanya sudah diolah atau ditabulasikan oleh kantor atau pihak yang bersangkutan⁵.

Untuk menggunakan datanya, biasanya pihak peneliti mencatat langsung data sekunder tersebut ke dalam tulisannya dan mengolah kembali dengan menyebutkan sumber perolehan datanya. Kemudian bisa dijadikan bukti suatu penelitian guna meyakinkan kebenaran hasil penelitian.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan pisah-pisah menurut kategori dalam memperoleh kesimpulan. Hasil perhitungan dan pengukuran dapat diproses dengan cara dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persamaan kemudian di tafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitas.

⁵ *Ibid*, h 64.

H. KONSEP OPERASIONAL

No.	Konsep	Indikator	Item
1.	Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan dan Pemerataan Pendidikan - Peningkatan Mutu Pendidikan - Pemantapan Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Sekolah Baru - Ruang Kelas Baru - Rehab Gedung - APK – APM - Distribusi Guru - Kompetensi Guru - Kesejahteraan Guru - Sarana Prasarana - Pengembangan Kurikulum - Akreditasi \ - BOS - Pendidikan Bersubsidi/Bantuan Masyarakat Kurang Mampu - Swadaya Masyarakat

2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan belajar anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pendidikan orang tua - Lemahnya ekonomi orang tua - Kurangnya sosialisasi tentang wajib belajar
		<ul style="list-style-type: none"> - Faktor-faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya guru yang profesional - Kurangnya kesejahteraan guru swasta - Kurangnya sarana prasarana - Sulitnya penyebaran Sungai Batang Gangsal - Rusaknya jalan raya

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM

Temuan umum yang Penulis peroleh selama penelitian tentang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

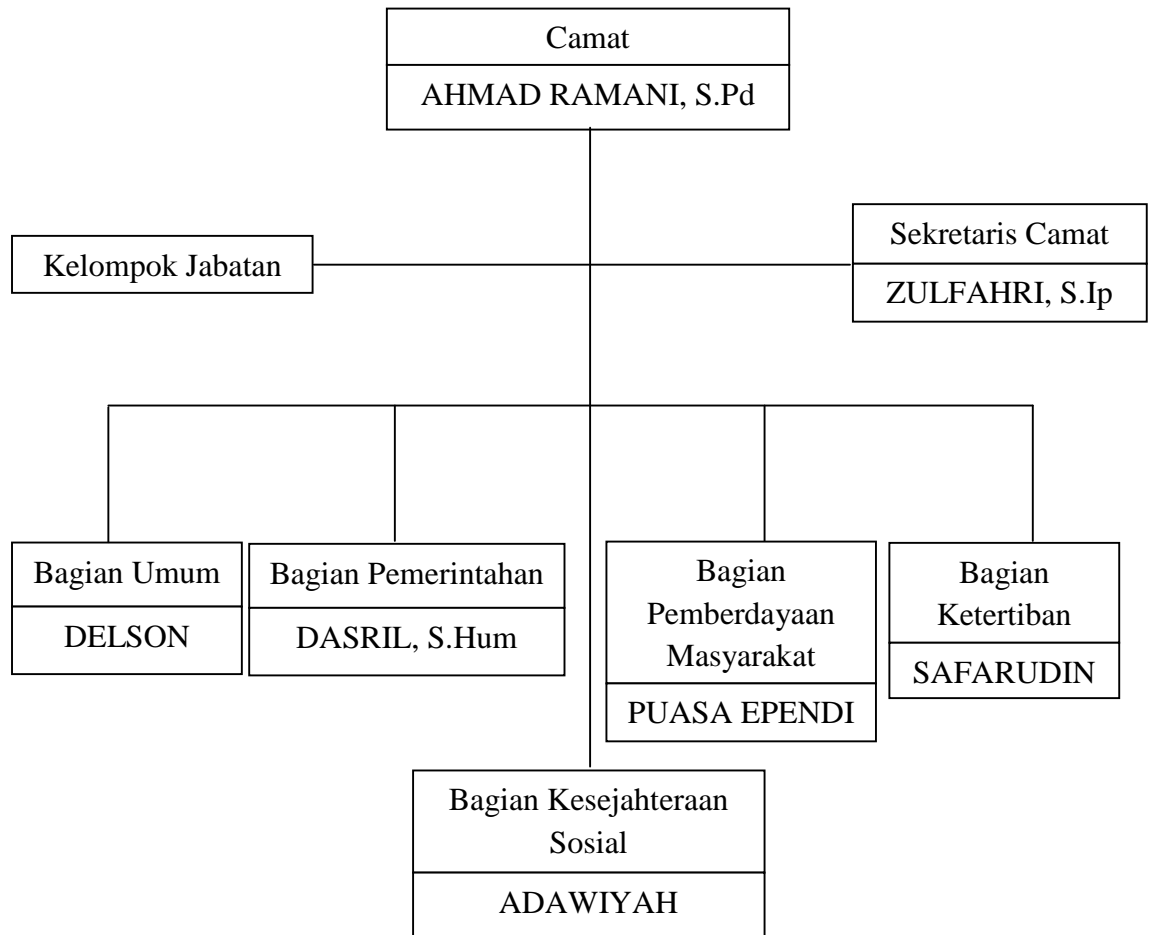
1. Sejarah Singkat Kecamatan Keritang

Kecamatan Keritang berdiri pada tanggal 11 Februari 1981, Sebelumnya Kecamatan Keritang adalah bagian dari Kecamatan Reteh. Seiring dengan kemajuan dan pertambahan jumlah penduduk sebagian wilayah Keritang, mekar menjadi Kecamatan baru yaitu Kecamatan Kemuning. Kecamatan Keritang sejak pertama berdiri sampai dengan sekarang dijabat oleh sebelas orang Camat.

Dalam pelaksanaan tugas harian Camat dibantu oleh seorang Sekretaris dan lima Kepala Bagian yaitu : Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertiban Keamanan, seperti struktur di bawah ini :

GAMBAR 2

Struktur dan Tugas Camat serta Kepala Bagian¹



Kecamatan Keritang terdiri dari 13 Desa dan sampai sekarang belum ada kelurahan. Berikut ini daftar Desa dan Kepala Desa yang menjabat Kecamatan Keritang :

¹ Sumber Data Kantor Camat Keritang, *Observasi*, Tanggal 10 Februari 2011

TABEL 2

Daftar Desa dan Kepala Daerah²

No.	Desa	Nama Kepala Desa
1	Desa Pebenaan	H. M. Yunus
2	Desa Seberang Pebenaan	H. Hamzah
3	Desa Kota Baru Reteh	Hamdanyani
4	Desa Nusantara Jaya	Syarifudin A. Said
5	Desa Kota Baru Seberida	Tarmizi Yusuf
6	Desa Kembang Sari	Darwis S. Ag
7	Desa Pasar Kembang	Yahya
8	Desa Kuala Keritang	Kaharudin
9	Desa Kuala Lemang	Damsir Latif
10	Desa Teluk Klasa	Raja Arafah
11	Desa Pengalihan	Muslim Laguik
12	Desa Pancur	H. Hayudin Rouf
13	Desa Sencalang	Imam Sentoso, SE

Kecamatan Keritang dilengkapi Kantor Instansi seperti :

- 1) Kantor Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Pendidikan
- 2) Kantor Urusan Agama
- 3) Kantor Dinas Perkebunan
- 4) Kantor Dinas Pertanian
- 5) Kantor Polisi Sektor Kecamatan Keritang

² Sumber Data Kantor Camat Keritang, *Observasi*, Tanggal 10 Februari 2011

- 6) BRI Unit Kota Baru
- 7) Kantor Pos dan Giro
- 8) Kantor PLN

2. Geografis

Kecamatan Keritang terletak pada 102,53 LU dan 0,40 BT, dengan luas keseluruhan 697,47 KM². Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Keritang sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
- Sebelah Selatan berbatas dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kemuning

Kecamatan Keritang dibelah oleh sebuah sungai yang bernama Sungai Batang Gangsal yang lebarnya 980 M.

Ibukota Kecamatan Keritang adalah Kota Baru, yang terletak di Desa Kota Baru Seberida. Jarak ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten Indragiri Hilir adalah 76 KM.

3. Demografis

- a. Penduduk

Penduduk Kecamatan Keritang berdasarkan data sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kecamatan Keritang adalah 61.289 jiwa yang tersebar dalam 13 desa sebagai berikut :

TABEL 3

Jumlah Penduduk Kecamatan Keritang Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010³

No.	Nama Desa	Rumah Tangga	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas (km ³)
			L	P		
1	Pebenaan	1.327	2.760	2.622	5.382	48,35
2	Seberang Pebenaan	869	1.914	1.929	3.843	36,75
3	Kotabaru Reteh	1.339	2.768	2.641	5.409	78,10
4	Nusantara Jaya	436	2.914	2.884	5.798	45,80
5	Kota Baru Seberida	2.151	4.261	4.238	8.499	37,20
6	Kembang Mekar Sari	578	1.263	1.140	2.403	36,65
7	Pasar Kembang	719	1.439	1.468	2.907	36,30
8	Kuala Keritang	957	2.046	2.031	4.007	77,39
9	Kuala Lemang	677	1.289	1.306	2.595	81,75
10	Teluk Kelasa	878	1.980	1.997	3.977	54,50
11	Pengalihan	1.678	3.578	3.512	7.090	77,15
12	Pancur	2.704	1.566	1.387	2.953	63,00
13	Sencalang	1.550	3.315	3.041	6.356	74,53
JUMLAH		15.863	31.093	30.196	61.289	697,47

Masyarakat / penduduk Kecamatan Keritang terdiri dari beberapa suku yaitu:

³ Sumber Data Kantor Camat Keritang, *Observasi*, Tanggal 10 Februari 2011

TABEL 4

*Jumlah Penduduk Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Suku*⁴

No.	SUKU	JUMLAH	PERSENTASE
1	Melayu	15.322	25 %
2	Banjar	14.709	24 %
3	Jawa	15.936	26 %
4	Bugis	13.483	22 %
5	Minang	920	1,5 %
6	China (Tionghoa)	307	0,5 %
7	Lain-lain	612	1 %
JUMLAH		61.289	100 %

Dari tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa kelompok suku yang paling banyak jumlahnya ialah dari suku Jawa yaitu 26 %, kemudian kelompok suku Melayu yaitu 25 %, kemudian dari kelompok suku Banjar yaitu 24 %.

b. Mata Pencaharian

Untuk mengetahui secara jelas mengenai mata pencaharian masyarakat Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁴ Sumber Data Kantor Camat Keritang, *Observasi*, Tanggal 10 Februari 2011

TABEL 5

Jumlah Penduduk Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Menurut Mata Pencaharian⁵

NO.	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PERSENATSE
1	Petani	14.096	23 %
2	Perkebunan	16.548	27 %
3	Pedagang	11.033	18 %
4	Guru / Pegawai	6.128	10 %
5	Dan lain-lain	11.033	18 %
JUMLAH		61.289	100 %

Melihat tabel 5 di atas, dapatlah diambil keterangan bahwa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, masyarakatnya 27 % adalah berkebun kemudian 23 % adalah petani.

4. Agama, Pendidikan dan Adat Istiadat

a) Agama

Untuk mengetahui lebih jelas tentang jumlah pemeluk agama di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁵ Sumber Data Kantor Camat Keritang, *Observasi*, Tanggal 10 Februari 2011

TABEL 6*Jumlah Penduduk Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir**Menurut Pemeluk Agama⁶*

NO.	AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Islam	60.676	99 %
2	Kristen Protestan	184	0,3 %
3	Kristen Katolik	184	0,3 %
4	Tinghoa	245	0,4 %
JUMLAH		61.289	100 %

Dari tabel 6 di atas, dapatlah diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar adalah memeluk agama Islam, kemudian pada tabel berikut ini akan disajikan pula dengan jelas tentang jumlah sarana ibadah yang terdapat di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

TABEL 7*Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir⁷*

No.	Nama Bangunan	Jumlah Bangunan
1.	Mesjid	72
2.	Mushalla	148
3.	Gereja	2
4.	wihara	1
JUMLAH		227

⁶ Sumber Data Kantor Camat Keritang, *Observasi*, Tanggal 10 Februari 2011

⁷ Sumber Data Kantor Camat Keritang, *Observasi*, Tanggal 10 Februari 2011

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapatlah dimengerti bahwa sarana ibadah di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 72 masjid.

b) Pendidikan

Untuk mengetahui pendidikan masyarakat di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 8

Jumlah Penduduk Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Pendidikan⁸

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Tidak / Belum Sekolah	45.970	75 %
2	TK / RA	612	1 %
3	Sekolah Dasar / MI	8.580	14 %
4	SLTP / MTs	3.064	5 %
5	SMU	2.451	4 %
6	Perguruan Tinggi	612	1 %
JUMLAH		61.289	100 %

Dari tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 75% hanya tamat SD/MI atau tidak sekolah, 14% tamat SD, 15% tamat SMP/MTs, 4% tamat SMU, 1% tamat PT dan 1% tamat TK/RA.

⁸ Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011.

c) Adat Istiadat

Adat istiadat yang ada dan terus dipertahankan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti suku-suku yang ada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, seperti adat istiadat, tata karma, berpakaian, pindah rumah dan lain sebagainya.

B. TEMUAN KHUSUS

1. Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengetahui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari hasil penelitian penulis berikut ini:

a) Perluasan dan Pemerataan Pendidikan

1) Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru dan Rehab Gedung

Dalam memperluas kesempatan belajar di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah dan masyarakat telah membangun sarana pendidikan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 9*Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Keritang Kabupaten**Indragiri Hilir⁹*

No.	Desa	Gedung Sekolah							
		PAUD	TK/ RA	SD	MI	SMP	MTs	SMU	Aliyah
1	Pebenaan	-	1	3	2	1	1	-	1
2	Seberang Pebenaan	-	1	3	2	0	1	-	-
3	Kota Baru Reteh	-	1	3	4	2	1	1	1
4	Nusantara Jaya	-	2	3	3	1	3	0	1
5	Kota Baru Seberida	1	2	3	2	2	1	0	1
6	Kembang Mekar Sari	-	2	3	2	-	1	-	-
7	Pasar Kembang	1	1	3	3	-	1	-	1
8	Kuala Keritang	-	1	3	2	1	-	-	-
9	Kuala Lemang	-	-	3	2	-	-	-	-
10	Teluk Kelasa	-	1	3	3	1	1	-	-
11	Pengalihan	-	1	3	2	1	5	1	1
12	Pancur	-	-	3	2	-	1	-	1
13	Sencalang	-	1	3	2	-	-	-	1
Jumlah		2	14	39	31	9	16	2	8

⁹ Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011.

Dari tabel 9 di atas, dapat dilihat bahwa perluasan dan pemerataan sarana pendidikan di Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir telah terlaksana dengan baik, hanya karena luasnya daerah masih terdapat jarak antara sekolah dengan tempat tinggal anak mencapai 3 KM.

TABEL 10

Jumlah Sekolah yang Negeri dan Swasta¹⁰

No.	STATUS	JUMLAH	PERSENTASE
1	Negeri	46	38 %
2	Swasta	75	62 %
JUMLAH		121	100 %

Dari tabel 10 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sekolah yang swasta lebih banyak dari pada sekolah yang negeri yaitu 62% dengan jumlah gedung 75 sedangkan sekolah yang negeri atau pengelolaan sepenuhnya oleh pemerintah sebanyak 38% dengan 46 gedung sekolah.

Untuk melihat perluasan dan pemerataan pendidikan dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat jawaban responden pada tabel 12 berikut ini:

¹⁰ Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011.

TABEL 11

*Jawaban responden tentang unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB)
dan rehab gedung di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir¹¹*

No	Alternatif jawaban	Orang Tua		Guru		Siswa	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	a. Sangat Baik	39	82	19	80	70	84
	b. Baik	7	15	4	17	4	16
	c. Kurang Baik	2	31	1	3	-	-
	d. Tidak Baik	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	48	100	24	100	24	100

Dari tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban a yaitu sangat baik.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Salah satu indikator terlaksananya wajib belajar 9 tahun dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), data 4 (empat) tahun terakhir ketercapaian program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir untuk usia 7-12 tahun atau SD/MI adalah seperti tabel berikut ini:

¹¹ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

TABEL 12

Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Tingkat SD/MI dan Sederajat¹²

No.	Tahun	Penduduk Usia 7-12 Tahun	Siswa SD/MI/ Sederajat 7-12	Jumlah Anak yang Tidak Sekolah	APM (%)
1	2007	8201	6867	293	841
2	2008	8322	6879	259	82
3	2009	8423	7261	242	86
4	2010	8413	7345	177	87

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ketercapaian pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang pada tahun 2010/2011 untuk tingkat SD/MI telah tuntas paripurna yang mencapai 95% Angka Partisipasi Murni (APM).

Dan data 4 (Empat) tahun terakhir ketercapaian pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir usia 13-15 tahun SMP/MTs/Sederajat adalah seperti tabel berikut ini:

¹² Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011.

TABEL 13

Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Tingkat SMP/MTs/Sederajat¹³

No	Tahun	Penduduk Usia 13-15 Tahun	Siswa SMP/MTs 13-15 Tahun	Jumlah Anak yang Tidak Sekolah	APM (%)
1	2007	3081	2110	496	68
2	2008	3082	2164	471	70
3	2009	3113	2230	435	72
4	2010	3121	2271	387	73

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa ketercapaian pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada tingkat SMP/MTs baru mencapai 77% Angka Partisipasi Murni (APM).

Selanjutnya adalah data 4 (empat) tahun terakhir ketercapaian pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir usia 7-15 tahun SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹³ Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011.

TABEL 14*Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Tingkat SD/MI dan SMP/MTs¹⁴*

No	Tahun	Penduduk Usia 7-15 Tahun	Siswa SD/MI & SMP/MTs Usia 7-15 Tahun	Jumlah Anak yang Tidak Sekolah	APM (%)
1.	2007	11.282	10.493	789	77
2.	2008	11.404	10.674	730.	77
3.	2009	11.536	10.859	697	77
4.	2010	11.534	10.970	614	77

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir telah tuntas tingkat Madya dengan angka ketercapaian APM 89%.

Untuk melihat Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat jawaban responden pada tabel 15 berikut ini:

¹⁴ Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011.

TABEL 15

*Jawaban Responden tentang Kewajiban Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir*

(Aspirasi Masyarakat terhadap Wajib Belajar 9 Tahun)¹⁵

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
	a. Sangat Baik	12	25 %
	b. Baik	29	61 %
	c. Kurang Baik	7	14 %
	d. Tidak Baik	-	-
Jumlah		48	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban b yaitu baik.

a) Peningkatan Mutu Pendidikan

(1) Distribusi Guru

Untuk mengetahui distribusi guru dalam pelaksanaan wajib belajar di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁵ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

TABEL 16*Distribusi Guru SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Keritang Kabupaten**Indragiri Hilir¹⁶*

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH		PERSENTASE
		UNIT GEDUNG	GURU	
1.	SD/MI	70	490	68 %
2.	SMP/MTs	25	230	32 %
JUMLAH		95	720	100 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa distribusi guru untuk SD/MI 68% dengan jumlah 490 orang dan guru SMP/MTs 32% dengan jumlah 230 orang

Untuk melihat distribusi guru dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat jawaban responden pada tabel berikut ini:

TABEL 17*Jawaban Responden tentang Distribusi Guru di Kecamatan Keritang Kabupaten**Indragiri Hilir¹⁷*

No.	Alternatif Jawaban	Guru		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	a. Sangat Baik	1	5 %	2	5 %
	b. Baik	2	10 %	14	30 %
	c. Kurang Baik	13	55 %	24	50 %
	d. Tidak Baik	7	30 %	8	15 %
Jumlah		24	100 %	48	100 %

¹⁶ Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011.

¹⁷ Sumber Data *Hasil Angket Penelitian*, 25 Maret 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban c yaitu kurang baik.

b) Kompetensi Guru

(a) Pendidikan Guru

Untuk mengetahui pendidikan guru SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 18

Jumlah Guru SD/MI dan SMP/MTs Berdasarkan Pendidikan¹⁸

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	SMP/MTs	22	3 %
2.	SMU/MA	302	42 %
3.	D2	155	21 %
4.	S1	238	33 %
5.	S2	7	1 %
JUMLAH		721	100 %

Dari tabel 18 di atas dapat diketahui bahwa pendidikan guru SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Keritang 42% adalah berpendidikan akhir SMU/MA.

(b) Spesifikasi Guru

Untuk mengetahui spesifikasi guru SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁸ Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011.

TABEL 19*Jumlah Guru SD/MI dan SMP/MTs Menurut Spesifikasi¹⁹*

NO.	SPESIFIKASI GURU	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Linier	38	5,3 %
2.	Mismatch	682	94,7 %
JUMLAH		720	100 %

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa hanya 5,3% guru SD/MI dan SMP/MTs yang sesuai dengan latar pendidikannya.

Untuk mengetahui kompetensi guru dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 20*Jawaban Responden tentang Kompetensi Guru di Kecamatan Keritang**Kabupaten Indragiri Hilir²⁰*

No.	Alternatif Jawaban	Guru		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	a. Sangat Baik	-	-	4	8 %
	b. Baik	1	4 %	18	37 %
	c. Kurang Baik	21	89 %	22	45 %
	d. Tidak Baik	2	7 %	4	10 %
Jumlah		24	100 %	48	100 %

¹⁹ Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011.

²⁰ Sumber Data *Hasil Angket Penelitian*, 25 Maret 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban c yaitu kurang baik.

c) Kesejahteraan Guru

(a) Guru PNS dan Guru Bukan PNS

Untuk mengetahui guru PNS dan bukan PNS dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 21

Jumlah Guru SD/MI dan SMP/MTS Menurut Guru PNS/Guru Bukan PNS²¹

NO.	STATUS	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Guru PNS	223	31 %
2.	Guru Bukan PNS	497	69 %
JUMLAH		720	100 %

Dari tabel 21 di atas dapat diketahui bahwa 69% atau sebanyak 497 orang guru SD/MI dan SMP/MTs adalah Guru Bukan PNS yang kesejahteraannya adalah Honor dari yayasan atau penyelenggara pendidikan.

(b) Tunjangan Fungsional

Untuk mengetahui tunjangan fungsional profesi sebagai guru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

²¹ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

TABEL 22

Jumlah Guru Bukan PNS yang Menerima Tunjangan Fungsional²²

NO.	REALISASI	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Yang Menerima	298	60 %
2.	Yang Tidak Menerima	199	40 %
JUMLAH		720	100 %

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang bukan PNS yang menerima Tunjangan Fungsional sebanyak 60%.

(c) Sertifikasi Guru

Untuk mengetahui jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang telah di sertifikasi dapat diketahui pada tabel berikut ini:

TABEL 23

Jumlah Guru SD/MI dan SMP/MTs berdasarkan sertifikasi Guru²³

NO.	REALISASI	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Sertifikasi	43	6 %
2.	Tidak Sertifikasi	677	94 %
JUMLAH		720	100 %

²² Sumber Data Induk Kelompok Kerja Madrasah Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011.

²³ Sumber Data Induk Kelompok Kerja Madrasah Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa guru SD/MI dan SMP/MTs yang telah disertifikasi berjumlah 6%.

Untuk mengetahui kesejahteraan guru (swasta) dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat jawaban responden pada tabel berikut ini:

TABEL 24

Jawaban Responden tentang Kesejahteraan Guru²⁴

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
	a. Sangat Baik	2	8
	b. Baik	3	20
	c. Kurang Baik	16	65
	d. Tidak Baik	1	7
Jumlah		24	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban c yaitu kurang baik.

d) Sarana dan Prasarana penunjang Proses Belajar Mengajar

(a) Laboratorium

Untuk mengetahui jumlah sekolah/madrasah yang memiliki laboratorium dapat diketahui pada tabel berikut ini:

²⁴ Sumber Data *Hasil Angket Penelitian*, 25 Maret 2011

TABEL 25

Jumlah SD/MI dan SMP/MTs yang Memiliki Laboratorium²⁵

NO.	REALISASI	JUMLAH	PERSENTASE
1.	ADA	6	6 %
2.	TIDAK ADA	89	94 %
JUMLAH		95	100

(b) Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs

Untuk mengetahui sekolah/madrasah yang memiliki perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 26

Jumlah SD/MI dan SMP/MTs yang Memiliki Perpustakaan²⁶

NO.	REALISASI	JUMLAH	PERSENTASE
1.	ADA	14	15 %
2.	TIDAK ADA	81	85 %
JUMLAH		95	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa SD/MI dan SMP/MTs yang telah mempunyai perpustakaan sekolah adalah 15%.

²⁵ Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011

²⁶ Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011

(c) Sarana Olahraga

Untuk mengetahui SD/MI dan SMP/MTs yang mempunyai sarana olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 27

Jumlah SD/MI dan SMP/MTs yang Memiliki Sarana Olahraga²⁷

NO.	REALISASI	JUMLAH	PERSENTASE
1.	ADA	90	95 %
2.	TIDAK ADA	5	5 %
JUMLAH		95	100

(d) Sarana Musik

Untuk mengetahui sarana musik pada SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 28

Jumlah SD/MI dan SMP/MTs yang Memiliki Sarana Musik²⁸

NO.	REALISASI	JUMLAH	PERSENTASE
1.	ADA	12	13 %
2.	TIDAK ADA	83	87 %
JUMLAH		95	100

²⁷ Ibid.

²⁸ Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011

untuk mengetahui keadaan sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat jawaban responden pada tabel berikut ini:

TABEL 29

*Jawaban Responden tentang Sarana Prasarana di Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir²⁹*

No	Alternatif Jawaban	Guru		Orang Tua		Siswa	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	a. Sangat Baik	-	-	-	-	-	-
	b. Baik	2	10 %	4	8 %	2	8 %
	c. Kurang Baik	20	85 %	43	89 %	21	87 %
	d. Tidak Baik	2	5 %	1	3 %	1	5 %
	Jumlah	24	100 %	48	100 %	24	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban c yaitu kurang baik.

e) Pengembangan Kurikulum

(a) Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Madrasah (KKM)

²⁹ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

Untuk mempermudah koordinasi antar sekolah/madrasah, dan untuk memperlancar kegiatan proses pembelajaran pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir telah dibentuk 6 (Enam) Kelompok Kerja Guru (KKG) dan 2 (Dua) Kelompok Kerja Madrasah (KKM).

(b) Life Skill

Untuk mengetahui keberadaan life skill pada masing-masing sekolah/madrasah dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada table berikut ini:

TABEL 30

Jumlah Sekolah/Madrasah Menurut Life Skill yang Dimiliki³⁰

NO.	REALISASI	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Ada	8	8 %
2.	Tidak Ada	87	92 %
	JUMLAH	95	100 %

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa 6 (enam) sekolah /madrasah yang mempunyai pengembangan kurikulum dalam life skill.

Untuk mengetahui keadaan pengembangan kurikulum dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indargiri Hilir dapat dilihat jawaban responden pada tabel 31 berikut ini:

³⁰ Sumber Data Induk Kelompok Kerja Madrasah Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011.

TABEL 31

*Jawaban Responden tentang Pengembangan Kurikulum di Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir³¹*

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
	a. Sangat Baik	5	20 %
	b. Baik	11	45 %
	c. Kurang Baik	6	25 %
	d. Tidak Baik	2	10 %
Jumlah		24	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban b yaitu baik.

f) Akreditasi

Untuk mengetahui jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang telah terakreditasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 32

Jumlah SD/MI dan SMP/MTs Berdasarkan Akreditasi³²

NO.	REALISASI	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Ada	57	60 %
2.	Tidak Ada	38	40 %
	JUMLAH	95	100 %

³¹ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

³² Ibid

Untuk mengetahui nilai/akreditasi yang diperoleh oleh SD/MI dan SMP/MTs yang telah terakreditasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 33

*Jumlah SD/MI dan SMP/MTs yang Terakreditasi Berdasarkan Nilai/Peningkat*³³

NO.	NILAI/PENINGKAT	JUMLAH	PERSENTASE
1.	A	6	10 %
2.	B	9	15 %
3.	C	42	75 %
4.	D	38	75
JUMLAH		87	100 %

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 10% mendapat peningkatan akreditasi A, 15% pada peningkatan B, dan 75% dengan nilai C.

Untuk mengetahui keadaan akreditasi sekolah/madrasah SD/MI dan SMP/MTs dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat jawaban responden pada tabel 34 berikut ini:

³³ *Ibid*

TABEL 34

*Jawaban Responden tentang Akreditasi di Kecamatan Keritang Kabupaten
Indragiri Hilir³⁴*

No.	Alternatif Jawaban	Guru		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	a. Sangat Baik	5	20 %	9	18 %
	b. Baik	10	40 %	20	42 %
	c. Kurang Baik	7	30 %	12	25 %
	d. Tidak Baik	2	10 %	7	15 %
Jumlah		24	100 %	48	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban b yaitu baik.

1) Pemantapan Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun

(1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Program Pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

Melalui program ini pemerintah ingin membuktikan komitmennya terhadap jaminan hak warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan di

³⁴ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

tingkat dasar yang merupakan bagian dari pemenuhan tuntutan konstitusi UUD 1945.

Untuk itu, program Bantuan Operasional Sekolah sangat terkait erat dengan program nasional wajib belajar.³⁵

Untuk mengetahui jawaban responden tentang dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dilihat pada tabel 36 berikut ini :

TABEL 35

Jawaban Responden tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir³⁶

No	Alternatif jawaban	Guru		Siswa		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	a. Sangat Baik	21	88	20	85	45	93
	b. Baik	2	7	3	10	2	4
	c. Kurang Baik	1	5	1	5	1	3
	d. Tidak Baik	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	24	100	24	100	48	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban a yaitu sangat baik.

³⁵ Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2009, hlm 11.

³⁶ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

(2) Pendidikan Bersubsidi / Bantuan Masyarakat Kurang Mampu

Pendidikan bersubsidi merupakan implementasi dari pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Jadi, setiap masyarakat yang dianggap mampu akan kita himbau untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa kekurangan biaya, bagi siswa tidak mampu dan bagi siswa yang mampu tetap dikenakan kewajiban-kewajiban yang diperlukan.

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa program pendidikan bersubsidi tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kebutuhan biaya pendidikan. Pendidikan bersubsidi yang digulirkan merupakan visi/cita-cita pemerintah Indragiri Hilir untuk membantu semaksimal mungkin meringankan biaya pendidikan bagi anak negeri Seribu Parit Bumi Sri Gemilang yang kurang mampu dan pada gilirannya diharapkan akan menciptakan suasana tidak ada keragu-raguan bagi orang tua untuk memasukkan anaknya bersekolah. Dilain pihak, bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, pendidikan bersubsidi tidak memilih peran serta dan dukungan masyarakat untuk mendukung kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan.³⁷

Untuk mengetahui jawaban responden terhadap pendidikan bersubsidi /bantuan masyarakat kurang mampu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

³⁷ *Petunjuk Teknis Pendidikan Bersubsidi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010*, hlm 5.

TABEL 36

Jawaban Responden tentang Bantuan Masyarakat Kurang Mampu³⁸

No.	Alternatif Jawaban	Guru		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	a. Sangat Baik	5	20	7	15
	b. Baik	14	60	26	55
	c. Kurang Baik	4	15	10	20
	d. Tidak Baik	1	5	5	10
	Jumlah	24	100 %	48	100 %

TABEL 37

Jawaban Responden tentang Pendidikan Bersubsidi/Bantuan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

No	Alternatif jawaban	Guru		Siswa		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	a. Sangat Baik	-	-	-	-	2	5 %
	b. Baik	18	75 %	19	80 %	36	70 %
	c. Kurang Baik	5	20 %	4	15 %	10	20 %
	d. Tidak Baik	2	5 %	1	5 %	2	5 %
	Jumlah	24	100 %	24	100 %	48	100 %

³⁸ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban b yaitu baik.

(3)Swadaya Masyarakat

Swadaya/partisipasi masyarakat Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari jumlah sekolah/madrasah pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang berjumlah 95 unit, dari 95 unit 36% adalah negeri dan 64% adalah swasta. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 38

Jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Negeri/Swasta³⁹

NO.	STATUS	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Negeri	34	36 %
2.	Swasta	61	64 %
	JUMLAH	95	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa swadaya/partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban b yaitu baik.

³⁹ Sumber Data Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Keritang, *Observasi*, Tanggal 13 Februari 2011

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Faktor-faktor yang memengaruhi wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- a) Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesempatan Belajar Anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan belajar anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- (1) Rendahnya Pendidikan Orang Tua

Rendahnya pendidikan orang tua dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 39

Pendidikan Orang Tua Anak⁴⁰

NO.	ALTERNATIF JABATAN	ORANG TUA YANG ANAKNYA TIDAK SEKOLAH		ORANG TUA YANG ANAKNYA SEKOLAH	
		JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE
1.	A. S2	-	-	2	4 %
2.	B. S1	-	-	29	60 %
3.	C. D2	-	-	11	22 %
4.	D. SMA/MA	5	10 %	3	6 %
5.	E. SMP/MTs	12	25 %	2	5 %
6.	F. SD/MI	31	65 %	1	3 %
JUMLAH		48	100 %	48	100 %

⁴⁰ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

Rendahnya pendidikan orang tua merupakan faktor yang mempengaruhi kesempatan belajar anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang terdapat pada tabel 40, dimana 65% dari orang tua anak yang tidak sekolah / putus sekolah adalah berpendidikan SD/MI.

(2) Lemahnya Ekonomi Orang Tua

Untuk mengetahui secara jelas tingkat ekonomi orang tua anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 40

Tingkat Ekonomi Orang Tua

NO.	ALTERNATIF JABATAN	ORANG TUA YANG ANAKNYA TIDAK SEKOLAH		ORANG TUA YANG ANAKNYA SEKOLAH	
		JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE
1.	A. Tinggi	-	-	23	47 %
2.	B. Sedang	7	15	24	49,8 %
3.	C. Rendah	41	85	1	3,2 %
JUMLAH		48	100 %	48	100 %

Lemahnya ekonomi orang tua juga merupakan faktor yang memengaruhi kesempatan belajar anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan tabel 40 di atas, dapat diketahui bahwa orang tua yang anaknya tidak sekolah/putus sekolah lebih banyak memilih alternatif jawaban C yaitu menunjukkan bahwa ekonomi yang rendah sebesar 85%. Sedangkan orang tua yang anaknya sekolah lebih banyak memilih jawaban B yaitu sebesar 49,8% dan A 47%. Dilihat dari tabel 40 ini, maka jelaslah bahwa anak yang tidak/putus sekolah orang tuannya berekonomi lemah dibandingkan dengan ekonomi orang tua yang anaknya sekolah. Karena lemahnya ekonomi orang tua tersebut, maka orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya, bahkan mempergunakan tenaga anaknya yang semestinya masih duduk di bangku sekolah, untuk membantu mencari nafkah hidup keluarga. Hal ini dapat dilihat pada tabel 41 dimana responden yang memilih jawaban A sebanyak 54 % yaitu sering memperkerjakan anaknya. Dengan demikian jelaslah bahwa lemahnya ekonomi orang tua dapat menghambat pendidikan anak.

Untuk mengukur tingkat ekonomi orang tua anak adalah sebagai berikut:

1. Tinggi : Penghasilan di atas Rp. 3.000.000,-/bulan
2. Sedang : Penghasilan dari Rp. 2.000.000,-/bulan s/d
Rp. 3.000.000,-/bulan
3. Rendah : Penghasilan di bawah Rp. 1.000.000,-/bulan

Untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga bagi orang tua anak yang berpenghasilan rendah telah memperkerjakan anaknya pada jam sekolah berlangsung. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 41

Jawaban Responden yang Memperkerjakan Anaknya⁴¹

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	A. Sering	26	54 %
2.	B. Kadang-Kadang	19	39 %
3.	C. Tidak Pernah	3	7 %
JUMLAH		48	100 %

Berdasarkan tabel 41 di atas, dapat dipahami bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban A yaitu sering dengan jumlah 54 %, kemudian yang memilih alternatif jawaban B yaitu kadang-kadang berjumlah 39 % sedangkan yang memilih alternatif jawaban C yaitu tidak pernah yang berjumlah 7%.

(3) Kurangnya Sosialisasi tentang Wajib Belajar 9 Tahun

Untuk mengetahui tentang sosialisasi wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 42

Jawaban Responden terhadap Sosialisasi tentang Wajib Belajar 9 Tahun⁴²

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	A. Pernah	2	5 %
2.	B. Tidak Pernah	46	95 %
JUMLAH		48	100 %

⁴¹ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

⁴² Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

Kurangnya sosialisasi tentang wajib belajar 9 tahun juga termasuk faktor yang mempengaruhi kesempatan belajar di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil tabel 42 di atas, dapatlah diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban B yaitu tidak pernah dengan jumlah 5 % sedangkan responden yang memilih alternatif jawaban A yaitu tidak pernah sebanyak 95 %.

Melihat hasil tabel 42 tersebut dapat pula disampaikan bahwa sosialisasi tentang program wajib belajar 9 tahun jarang didapatkan oleh orang tua anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga mereka kurang paham tentang arti penting belajar dalam kehidupan anaknya.

b) Faktor- Faktor Penyebab Kurang Terlaksananya Peningkatan Mutu
Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri
Hilir

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

(1) Kurangnya Guru yang Profesional / yang Sesuai dengan Latar
Belakang Pendidikan

Untuk mengetahui tentang kurangnya guru yang profesional/ yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 43

Jawaban Responden tentang Latar Belakang Pendidikan⁴³

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Sesuai dengan latar belakang pendidikan	2	9 %
2.	Tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan	22	91 %
JUMLAH		24	100 %

Kurangnya guru yang professional memperkuat faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan tabel 43 dapat diketahui bahwa guru yang mengajar di SD/MI dan SMP/MTs lebih banyak memilih alternatif jawaban B yaitu 91 %, guru tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan 9 % guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

(2) Kesejahteraan Guru Swasta

Untuk mengetahui tentang kesejahteraan guru swasta sapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁴³ Sumber Data *Hasil Angket Penelitian*, 25 Maret 2011

TABEL 44

Jawaban Responden Terhadap Honor Satu Jam Pelajaran⁴⁴

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	A. 7000	-	- %
2.	B. 6.000	2	9 %
3.	C. 5.000	7	30 %
4.	D. 4.000	15	61 %
JUMLAH		24	100 %

Kurangnya kesejahteraan guru swasta adalah faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan di Kecamatan Keritang guru swasta berjumlah 497 orang.

Kurangnya kesejahteraan guru swasta sesuai dengan tabel 45, responden lebih banyak memilih alternatif jawaban D yaitu 61 % atau Rp. 4.000/jam pelajaran. Untuk meningkatkan kesejahteraan para guru swasta menambah penghasilan dengan berbagai kegiatan seperti berkebun, berdagang dan lain-lain, sehingga tugas mengajar tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

(3) Kurangnya Sarana Prasarana Belajar

Untuk mengetahui keadaan sarana prasarana penunjang dalam proses belajar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁴⁴ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

TABEL 45

*Jawaban Responden Terhadap Sarana Prasarana Belajar*⁴⁵

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	A. Cukup	2	10 %
2.	B. Kurang	16	65 %
3.	C. Kurang Sekali	6	25 %
JUMLAH		24	100 %

Kurangnya sarana prasarana belajar menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indagiri Hilir. Hal ini sesuai dengan tabel 45, responden lebih banyak memilih alternatif jawaban B yaitu kurang sebesar 65 %, sebagian besar sekolah kekurangan sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar seperti laboratorium, sarana musik, olahraga, dan lain-lain.

(4) Sulitnya Penyeberangan Sungai Batang Gangsal

Untuk mengetahui keadaan penyeberangan Sungai Batang Gangsal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁴⁵ Sumber Data *Hasil Angket Penelitian*, 25 Maret 2011

TABEL 46*Jawaban Responden Terhadap Penyeberangan Sungai Batang Gangsal⁴⁶*

No.	Alternatif Jawaban	Guru		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	a. Mudah Sekali	-	-	1	5 %
	b. Mudah	1	5 %	2	8 %
	c. Sulit	19	80 %	17	70 5
	d. Sulit Sekali	4	15 %	4	17 %
	Jumlah	24	100 %	24	100 %

Sulitnya penyeberangan Sungai Batang Gangsal merupakan faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan tabel 46 dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban C yaitu sulit menyeberangi Sungai Batang Gangsal, untuk menyeberangi harus menunggu, berdesakan, berebut dan sangat rawan kecelakaan. Guru dan siswa sering terlambat hadir di sekolah.

(5) Keadaan Jalan Raya

Untuk mengetahui keadaan jalan raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁴⁶ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

TABEL 47*Jawaban Responden Terhadap Keadaan Jalan Raya⁴⁷*

No.	Alternatif Jawaban	Guru		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	a. Mudah Sekali	-	-	-	-
	b. Mudah	2	5 %	1	6 %
	c. Sulit	15	64 %	17	69 %
	d. Sulit Sekali	7	31 %	6	25 %
Jumlah		24	100 %	24	100 %

Keadaan jalan raya yang sebagian besar dalam keadaan rusak juga merupakan faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan tabel 47 dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban C 64 % yaitu keadaan jalan raya rusak, sehingga guru, murid sering terlambat hadir di sekolah.

C. ANALISA

1. Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indargiri Hilir

a) Perluasan dan Pemerataan Pendidikan

(1) Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan Rehab Gedung

⁴⁷ Sumber Data Hasil Angket Penelitian, 25 Maret 2011

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa perluasan dan pemerataan (gedung) sekolah di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 11 bahwa ketersediaan gedung sekolah telah memadai untuk anak 7-15 tahun yang akan belajar. Pada setiap Desa telah tersedia gedung sekolah baik umum maupun agama yang negeri maupun swasta.

Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang keberadaan gedung sekolah, responden lebih banyak memilih alternatif jawaban A yaitu sangat baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan informan pada tanggal 13 Januari 2011 sebagai berikut :

“Pendidikan di Kecamatan Keritang perlu terus diperbaiki, semua instansi terkait harus ikut serta berperan secara aktif dalam memajukan pendidikan di Kecamatan Keritang. Apalagi Kecamatan Keritang di era globalisasi, informasi dan komunikasi yang berkembang pesat tantangan semakin berat, berbagai akses telah terbuka, tanpa benteng ilmu pengetahuan yang mantap generasi muda Kecamatan Keritang khususnya akan terbawa oleh arus negatif. Masyarakat Kecamatan Keritang diharapkan berpartisipasi untuk menyukseskan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang demi kepentingan di masa mendatang”.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan informan pada tanggal 20 Januari 2011 sebagai berikut :

“Saya adalah mantan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Keritang, jadi saya masih komitmen terhadap keinginan saya untuk memajukan pendidikan di

Kecamatan Keritang ini dan saya berharap kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan yang terus berusaha keras memajukan pendidikan yang sejalan dengan rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir”.

(2) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/MI di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir telah tuntas paripurna yaitu 95%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 12, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir baru mencapai 77% dari Angka Partisipasi Kasar (APK), hal ini dapat dilihat pada tabel 13. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 7-15 tahun atau SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel 14. Dari tabel dapat diketahui bahwa pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir telah tuntas tingkat madya dengan angka ketuntasan Angka Partisipasi Kasar 89%.

Pada tabel 15 dapat dilihat tanggapan/jawaban responden tentang kewajiban belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, responden lebih banyak memilih alternative jawaban B yaitu baik sebanyak 615. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan informan pada tanggal 21 Januari 2011 sebagai berikut :

“Bahwa masih banyak tantangan dan hambatan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang khususnya pada usia 13-15 tahun. Faktor

utama penyebab anak putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan dan pengaruh lingkungan masyarakat yang kurang mendukung untuk kemajuan pendidikan, orang tua, cenderung menyuruh anaknya bekerja untuk mencari uang”.

b) Peningkatan Mutu Pendidikan

(1) Distribusi Guru

Distribusi guru pada SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir secara umum telah baik, pada setiap sekolah/madrasah guru telah cukup. Hal ini dapat dilihat pada tabel 16, antara jumlah guru dan jumlah sekolah telah berimbang. Namun yang masih dirasakan baik adalah pendistribusian guru negeri terutama pada sekolah/madrasah yang swasta.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi Penulis dilapangan pada hasil wawancara Penulis dengan seorang informan pada tanggal 23 Januari 2011 sebagai berikut :

“ Mutu pendidikan agama di Kecamatan Keritang masih sangat rendah, semua MI dan MTs masih swasta, untuk pelaksanaannya masih perlu swadaya masyarakat, gurunya pun sebagian besar honor murni, komite/yayasan dengan gaji yang rendah. Mudah-mudahan ke depan dapat kita perbaiki demi kemajuan pendidikan, demikian juga pelaksanaan pendidikan non formal untuk dapat terus diperhatikan seperti TPA, TPQ dan MPA”.

(2) Kompetensi Guru

a. Pendidikan Guru

Pendidikan guru SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel 19, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa guru yang mengajarkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya 5,3% yang berjumlah 38 orang, sedangkan 4,7% adalah tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang berjumlah 682 orang.

Pada tabel 20 dapat dilihat jawaban responden tentang kompetensi guru, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban C yaitu kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan informan pada tanggal 27 Januari 2011, beliau mengatakan sebagai berikut :

“Jumlah gedung MI dan MTs di Kecamatan Keritang sudah mencukupi, hanya perbaikan-perbaikan yang perlu diupayakan. Tentang mutu gurunya, belum ada guru mata pelajaran umum seperti Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia, IPA, IPS yang diajarkan oleh guru yang dibidangnya”.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi Penulis dan wawancara dengan informan pada tanggal 8 Maret 2011 sebagai berikut :

“Swadaya masyarakat masih sangat tinggi, tapi masih sulit mencari guru yang sarjana karena kendala biaya”.

(3) Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan guru SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 24, jawaban responden lebih banyak memilih alternatif jawaban C yaitu kurang baik 65% sebanyak 16 orang.

Dan rendahnya kesejahteraan guru swasta ini juga merupakan faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini dapat dilihat pada tabel 46 yang mana responden lebih banyak memilih alternatif jawaban D yaitu Rp. 4.000,-/jam pelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan informan pada tanggal 8 Maret 2011 sebagai berikut :

“Swadaya masyarakat masih sangat tinggi, tapi masih sulit mencari guru yang sarjana karena kendala biaya”.

(4) Sarana Prasarana (Penunjang Proses Belajar Mengajar)

Sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar seperti laboratorium, perpustakaan, sarana ibadah, alat olahraga, alat music, dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 25, tabel 26, tabel 27, dan tabel 28, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar kurang baik.

Pada tabel 30 dapat diketahui bahwa jawaban responden lebih banyak memilih alternatif jawaban C yaitu kurang baik.

(5) Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum seperti adanya Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Madrasah (KKM) and life skill dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 31, dan tabel tersebut dapat diketahui jawaban responden tentang pengembangan kurikulum, responden lebih banyak memilih alternatif jawaban B yaitu baik sebanyak 45%.

(6) Akreditasi

Pada tabel 32 dapat diketahui bahwa 60% SD/MI dan SMP/MTs telah terakreditasi sebanyak 57 sekolah/madrasah dan 40% SD/MI dan SMP/MTs yang belum terakreditasi sebanyak 38 sekolah/madrasah.

Pada tabel 34 dapat dilihat jawaban responden tentang akreditasi sekolah/madrasah di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, responden lebih banyak memilih alternatif jawaban B yaitu baik.

c) Pematapan Wajib Belajar 9 Tahun

(1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tabel 36 dapat diketahui tanggapan / jawaban responden tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), responden lebih banyak memilih alternatif jawaban A yaitu sangat baik, terutama bagi sekolah/madrasah swasta Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar.

(2) Pendidikan bersubsidi/Bantuan Masyarakat Kurang Mampu

Pendidikan bersubsidi/Bantuan Masyarakat Kurang Mampu oleh pemerintah telah berangsur-angsur dapat dirasakan oleh masyarakat kurang mampu.

(3) Swadaya masyarakat

Swadaya masyarakat Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir masih cukup tinggi, pada tabel 30 dapat dilihat bahwa 64% sekolah/draah adalah swasta yang mana pengelolaannya sebagian besar di tanggung oleh masyarakat.

Dari urian di atas dapat dilihat rekapitulasi pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

TABEL 48

*Rekapitulasi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang
Kabupaten Indargiri Hilir*

No.	Item Soal	a	b	c	d	jumlah
1.	Tanggapan tentang unit sekolah baru, ruang kelas Baru dan rehap gedung					
	- Orang Tua	82	15	3	-	100 %
	- Guru	80	17	3	-	100 %
	- Siswa	84	16	-	-	100 %
2.	Tanggapan masyarakat tentang wajib belajar 9 tahun	25	61	14	-	100 %

3.	Tanggapan tentang distribusi guru					
	- Guru					
	- Orang Tua	5	10	55	30	100 %
		5	30	50	15	100 %
4.	Tanggapan tentang kompetensi guru					
	- Guru	-	4	89	7	100 %
	- Orang Tua	8	37	45	10	100 %
5.	Tanggapan guru tentang kesejahteraan guru	8	20	65	7	100 %
6.	Tanggapan tentang sarana prasarana penunjang pendidikan					
	- Guru	-	10	85	5	100 %
	- Orang tua	-	8	89	3	100 %
	- Siswa	-	8	87	5	100 %
7.	Tanggapan guru tentang pengembangan kurikulum	20	45	25	10	100 %
8.	Tanggapan tentang akreditasi					
	- Guru	20	40	30	10	100 %
	- Orang tua	18	42	25	5	100 %
9.	Tanggapan tentang bantuan operasional sekolah (BOS)					
	- Guru	88	7	5	-	100 %
	- Siswa	85	10	15	-	100 %
	- Orang tua	93	4	3	-	100 %

10.	Tanggapan tentang beasiswa					
	- Guru	-	75	20	25	100 %
	- Siswa	-	80	15	5	100 %
	- Orang tua	-	70	25	5	100 %
11.	Tanggapan tentang bantuan masyarakat kurang mampu					
	- Guru	20	60	15	5	100 %
	- Orang tua	15	55	20	10	100 %

Keterangan :

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Faktor-faktor yang memengaruhi wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indargiri Hilir adalah sebagai berikut :

a) Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesempatan Belajar Anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

(1) Rendahnya Pendidikan Orang Tua

Rendahnya pendidikan orang tua merupakan faktor yang mempengaruhi kesempatan belajar anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang terdapat pada tabel 39, dimana 65% dari orang tua anak yang tidak sekolah / putus sekolah adalah berpendidikan SD/MI. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan informan pada tanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut :

“Anak sekarang yang penting bisa bekerja, dari bekerja bisa membeli Handphone, sepeda motor dan lain-lain”.

(2) Lemahnya Ekonomi Orang Tua

Lemahnya ekonomi orang tua juga merupakan faktor yang mempengaruhi kesempatan belajar anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan tabel 40 di atas, dapat diketahui bahwa orang tua yang anaknya tidak sekolah/putus sekolah lebih banyak memilih alternatif jawaban C yaitu menunjukkan bahwa ekonomi yang rendah sebesar 85%. Sedangkan orang tua yang anaknya sekolah lebih banyak memilih jawaban B yaitu sebesar 49,8% dan A 47%. Dilihat dari tabel 41 ini, maka jelaslah bahwa anak yang tidak/putus sekolah orang tuannya berekonomi lemah dibandingkan dengan ekonomi orang tua yang anaknya sekolah. Karena lemahnya ekonomi orang tua tersebut, maka orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya, bahkan mempergunakan tenaga anaknya yang semestinya masih duduk di bangku sekolah, untuk membantu mencari nafkah hidup keluarga. Hal ini dapat dilihat pada tabel 41 dimana responden yang memilih jawaban A sebanyak 54 % yaitu sering memperkerjakan

anaknya. Dengan demikian jelaslah bahwa lemahnya ekonomi orang tua dapat menghambat pendidikan anak, hal ini sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan informan pada tanggal 21 Januari 2011 sebagai berikut:

“Bahwa masih banyak tantangan dan hambatan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang khususnya pada usia 13-15 tahun. Faktor utama penyebab anak putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan dan pengaruh lingkungan masyarakat yang kurang mendukung untuk kemajuan pendidikan, orang tua, cenderung menyuruh anaknya bekerja untuk mencari uang”.

(3) Kurangnya Sosialisasi tentang Wajib Belajar 9 Tahun

Kurangnya sosialisasi tentang wajib belajar 9 tahun juga termasuk faktor yang memengaruhi kesempatan belajar di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil tabel 43 , dapatlah diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban B yaitu tidak pernah dengan jumlah 5 % sedangkan responden yang memilih alternatif jawaban A yaitu tidak pernah sebanyak 95 %.

Melihat hasil tabel 43 tersebut dapat pula disampaikan bahwa sosialisasi tentang program wajib belajar 9 tahun jarang didapatkan oleh orang tua anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga mereka kurang paham tentang arti penting belajar dalam kehidupan anaknya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan informan pada tanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut :

“Anak sekarang yang penting bisa bekerja, dari bekerja bisa membeli Handphone, sepeda motor dan lain-lain”.

c) Faktor- Faktor Penyebab Kurang Terlaksananya Peningkatan Mutu Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

(1) Kurangnya Guru yang Profesional / yang Sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan

Kurangnya guru yang professional memperkuat faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan tabel 43 dapat diketahui bahwa guru yang mengajar di SD/MI an SMP/MTs lebih banyak memilih alternatif jawaban B yaitu 91 %, guru tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan 9 % guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan informan pada tanggal 27 Januari 2011 sebagai berikut:

“Jumlah gedung MI dan MTs di Kecamatan Keritang sudah mencukupi, hanya perbaikan-perbaikan yang perlu diupayakan. Tentang mutu gurunya, belum ada guru mata pelajaran umum seperti Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia, IPA, IPS yang diajarkan oleh guru yang dibidangnya”. Dan pada tanggal 26 Maret 2011 sebagai berikut :

“Bahwa masih banyak tantangan dan hambatan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang khususnya pada usia 13-15 tahun. Faktor utama penyebab anak putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan dan pengaruh lingkungan masyarakat yang kurang mendukung untuk kemajuan pendidikan, orang tua, cenderung menyuruh anaknya bekerja untuk mencari uang”.

(2) Kurangnya Kesejahteraan Guru Swasta

Kurangnya kesejahteraan guru swasta adalah faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan di Kecamatan Keritang guru swasta berjumlah 497 orang.

Kurangnya kesejahteraan guru swasta sesuai dengan tabel 43, responden lebih banyak memilih alternatif jawaban D yaitu 61 % atau Rp. 4.000/jam pelajaran. Untuk meningkatkan kesejahteraan para guru swasta menambah penghasilan dengan berbagai kegiatan seperti berkebun, berdagang dan lain-lain, sehingga tugas mengajar tidak bias dilaksanakan secara optimal. Sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan informan pada tanggal 23 Januari 2011 sebagai berikut:

“ Mutu pendidikan agama di Kecamatan Keritang masih sangat rendah, semua MI dan MTs masih swasta, untuk pelaksanaannya masih perlu swadaya masyarakat, gurunya pun sebagian besar honor murni, komite/yayasan dengan gaji yang rendah. Mudah-mudahan ke depan dapat kita perbaiki demi kemajuan

pendidikan, demikian juga pelaksanaan pendidikan non formal untuk dapat terus diperhatikan seperti TPA, TPQ dan MPA”.

(3) Kurangnya Sarana Prasarana Belajar

Kurangnya sarana prasarana belajar menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini sesuai dengan tabel 44, responden lebih banyak memilih alternatif jawaban B yaitu kurang sebesar 65 %, sebagian besar sekolah kekurangan sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar seperti laboratorium, sarana musik, olahraga, dan lain-lain.

(4) Sulitnya Penyeberangan Sungai Batang Gangsal

Sulitnya penyeberangan Sungai Batang Gangsal merupakan faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan tabel 46 dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban C yaitu sulit menyeberangi Sungai Batang Gangsal, untuk menyeberangi harus menunggu, berdesakan, berebut dan sangat rawan kecelakaan. Guru dan siswa sering terlambat hadir di sekolah. Sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan informan pada tanggal 20 Maret 2011 sebagai berikut :

“Saya sudah bersiap-siap sejak pagi tapi tidak ada angkutan, guru saya pun sudah memaklumi ini”.

(5) Keadaan Jalan Raya

Keadaan jalan raya yang sebagian besar dalam keadaan rusak juga merupakan faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan tabel 47 dapat diketahui bahwa responden lebih banyak memilih alternatif jawaban C 64 % yaitu keadaan jalan raya rusak, sehingga guru, murid sering terlambat hadir di sekolah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di bagi dalam 2 bagian

- a) Yang terlaksana dengan baik

Dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir beberapa hal yang telah terlaksana dengan baik seperti:

- (1) Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehab gedung

Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehab gedung telah tersedia, perluasan dan akses gedung telah cukup untuk menampung anak usia 7-15 tahun yang akan belajar.

- (2) Dana Operasional Sekolah (BOS)

Dana Operasional Sekolah (BOS) telah terlaksana dengan baik dan sangat dirasakan manfaatnya dalam pemantapan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

(3) Pendidikan bersubsidi/bantuan masyarakat kurang mampu

(4) Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi dan sangat dirasakan dalam pemantapan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun terutama bagi sekolah / madrasah swasta.

b) Yang belum terlaksana dengan baik

Dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang belum terlaksana dengan baik adalah:

(1) Partisipasi masyarakat/ tanggapan terhadap wajib belajar 9 tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan bahwa masih ada anak usia 7-15 tahun tidak sekolah sebanyak 564 orang.

(2) Distribusi guru (Guru Pegawai Negeri) belum dapat membantu dalam meningkatkan mutu terutama pada sekolah/madrasah swasta.

(3) Kompetensi guru

Kompetensi guru dalam peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

(4) Kesejahteraan Guru (Swasta)

Kesejahteraan guru swasta masih sangat rendah.

(5) Sarana prasarana

Sarana prasarana penunjang kelancaran proses belajar mengajar masih sangat kurang.

(6) Pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pada pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

(7) Akreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang telah terlaksana 60 % 57 sekolah/madrasah.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

a. Faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan wajib belajar anak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

- 1) Rendahnya pendidikan orang tua
- 2) Lemahnya ekonomi orang tua
- 3) Kurangnya sosialisasi wajib belajar 9 tahun

b. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang terlaksananya mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

- 1) Kurangnya guru yang professional
- 2) Kurangnya kesejahteraan guru swasta
- 3) Kurangnya sarana prasarana
- 4) Sulitnya penyeberangan Sungai Batang Gangsal
- 5) Jalan raya yang rusak

B. SARAN

1. Kepada pemerintah agar terus memperhatikan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun seperti Unit Sekolah Baru, ruang kelas baru dan rehab gedung serta terus mengupayakan Dana Operasional Sekolah (BOS) dan terus mengupayakan pendidikan bersubsidi/bantuan masyarakat kurang mampu.
2. Kepada pemerintah agar mengawasi/memantau di lapangan dan memberikan sosialisasi secara berkesinambungan tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.
3. Kepada pihak masyarakat agar dapat terus memberikan motivasi agar swadaya dapat ditingkatkan.

4. Kepada pemerintah dan masyarakat agar dapat mencari solusi terhadap hal-hal yang menyebabkan kurang terlaksananya peningkatan mutu wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir seperti kurangnya guru yang profesional, kurangnya kesejateraan guru swasta, kurangnya sarana prasarana penunjang pendidikan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Iskandar, 2010, *Meningkatkan Kreatifitas Pembelajaran Bagi Guru*,

Jakarta, Bestari Buana Insani

Ali Muhammad, 2009, *Kurikulum di Sekolah*, Bandung, Sinar Baru Algendindo

Chan San M dan Sam Tuti T, 2010, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*,

Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Denim Sudarwan, 2010, *Media Komunikasi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara

Departemen Agama RI, 2009, *Buku Bantuan Operasional Sekolah Untuk*

*Pendidikan Gratis dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu
tahun 2009*,

Derajat Zakiyah, 2009, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara

Dinas Pendidikan Indragiri Hilir, 2010, *Petunjuk Teknis Pendidikan Bersubsidi*

di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2010

Djamas Nur Hayati, 2009, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia*

Pascamerdeka, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Fattah Nanang, 2009, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung, PT

Remaja Rosda Karya

Hasbullah. 2006, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Hamalik Oemar, 2009, *Psikologi Belajar Mengajar*, Bandung, Sinar Brau

Algensindo

Imron Ali, 2008, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara

Momies We R, 2007, *Peranan Orang Tua dan Praktisi dalam Membantu*

Tumbuh Kembangkan Anak Berbakat Melalui Pemahaman Toei dan

Tren Pendidikan, Jakarta, Prenada Media Group

Mujib Abdul dan Muzakir Yusuf, 2006, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta,

Kencana Prenada Media Group

Mulyasa E, 2009, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung, PT Remaja Rosda

Karya

Nasution S dan Tomas M, 2010, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi,*

Disertasi, Makalah, Jakarta, Bumi Aksara

Nata Abudin Hj, 2010, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta, Kencana Prenada Media

Group

Nizar Samsul Hj dan Siafudin Muhammad, 2010, *Isu-isu Kontemporer tentang*

Pendidikan Islam, Jakarta, Kalam Mulia

Rivai Veithzal Sanjaya Wana, 2008, *Pembelajaran dalam Implementasi*

Kurikulum Berbasis Kompetensi, Jakarta, Kencana Premedia Grop

Santrock John W, 2007, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, PT Pajar Interpretama

Offset

Supriadi Dedi, 2005, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*, Bandung, PT

Remaja Rosda Grop